



LAPORAN KINERJA



PUSDIKLAT BPS 2018



*PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PUSAT STATISTIK*

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik (Pusdiklat BPS) 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Pusdiklat BPS sebagai penyelenggara negara. Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2018 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusdiklat BPS atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan laporan ini adalah mengevaluasi capaian kinerja sasaran Pusdiklat BPS selama tahun 2018.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2018, perkembangan realisasi kinerja terhadap tahun sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS tahun 2018 dan 2019. Hasil laporan ini diharapkan menjadi masukan bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal pada tahun mendatang.

Pimpinan Pusdiklat BPS mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 27 Februari 2019

Kepala Pusdiklat BPS



Marsudijono, S.Si, MM

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vii
Ringkasan Eksekutif	viii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi	4
1.4 Sumber Daya Manusia (SDM)	7
1.5 Potensi dan Permasalahan	9
1.6 Sistematika Penyajian Laporan	12
Bab II Perencanaan Kinerja	13
2.1 Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS 2015-2019	15
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Pusdiklat BPS Tahun 2018	18
Bab III Akuntabilitas Kinerja	21
3.1 Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2018	23
3.2 Perkembangan Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2018 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2018	26
3.3 Capaian Kinerja Pusdiklat BPS terhadap Target Renstra 2018 dan 2019	57
3.4 Kegiatan Prioritas Pusdiklat BPS Tahun 2018	60
3.5 Upaya Efisiensi	61
3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2018	61
Bab IV Penutup	69
4.1 Tinjauan Umum	71
4.2 Tindak Lanjut	72
Lampiran	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Pusdiklat BPS 2015-2019	17
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2018	19
Tabel 3. Kontribusi Unit Kerja Terhadap Penyusunan Target Indikator	20
Tabel 4. Rata-rata Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2018	24
Tabel 5. Capaian Kinerja Tujuan: Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima Tahun 2018	26
Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima Tahun 2018	27
Tabel 7. Jumlah Pegawai BPS yang memperoleh Beasiswa S2 dan S3 tahun 2018	54
Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang Transparan Tahun 2018	55
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2018 dengan Target Renstra Tahun 2018 dan 2019	58
Tabel 10. Pagu Anggaran Menurut Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima Tahun 2018	62
Tabel 11. Pagu Anggaran Pusdiklat BPS Menurut Program dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2018 (Juta Rupiah)	63
Tabel 12. Realisasi Anggaran Pusdiklat BPS TA 2018 (Juta Rupiah)	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Pusdiklat BPS	7
Gambar 2. Komposisi SDM Pusdiklat BPS menurut Jabatan	8
Gambar 3. Komposisi SDM Pusdiklat BPS menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	9
Gambar 4. Nilai Inti BPS	16
Gambar 5. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pusdiklat BPS	18
Gambar 6. Kegiatan Pembukaan Pelatihan Dasar CPNS Gol. III	30
Gambar 7. Kegiatan Pembelajaran Pelatihan Dasar CPNS Gol. III	31
Gambar 8. Kegiatan Pembukaan Diklatpim Tingkat IV	32
Gambar 9. Kegiatan Pembelajaran Diklatpim Tingkat IV	33
Gambar 10. Kegiatan Pembukaan Diklatpim Tingkat III	34
Gambar 11. Kegiatan Pembelajaran Diklatpim Tingkat III	35
Gambar 12. Pembukaan Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli	38
Gambar 13. Foto Bersama Pimpinan Pusdiklat BPS Dalam Rangka Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli (PNBP)	39
Gambar 14. Suasana Pembelajaran Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil (PNBP) di Kinasih Resort	40
Gambar 15. Foto Bersama Pimpinan Pusdiklat BPS Dalam Rangka Diklat Penulisan KTI	41
Gambar 16. Pembukaan Diklat Teknis Komputer	42
Gambar 17. Suasana Pembelajaran Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis	43
Gambar 18. Pemberian Hadiah pada 3 Peserta Terbaik Dalam Rangka Penutupan Diklat Pengenalan Statistik Dasar	44
Gambar 19. Kegiatan Ujian Sertifikasi Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	46
Gambar 20. Suasana Pembelajaran di Kelas Diklat Bendahara Pengeluaran	47

Gambar 21.	Persentase Penyelesaian Surat Izin Belajar oleh Pusdiklat BPS pada Jenjang Pendidikan S1, S2, dan S3, Tahun 2018	49
Gambar 22.	Peserta TB APBN BPS S2 IPB Tahun 2018	51
Gambar 23.	Acara Pembekalan Kepala Pusdiklat BPS kepada Peserta TB S2 UI Tahun 2018	52
Gambar 24.	Acara Pembekalan Kepala Pusdiklat BPS kepada Peserta TB S2 Unair Tahun 2018	52
Gambar 25.	Acara Wisuda Peserta Tugas Belajar S2 UGM MEP	53
Gambar 26.	Acara Yudisium Peserta TB S3 UI Ilmu Ekonomi	53
Gambar 27.	Grafik Penyerapan Anggaran Pusdiklat BPS Tahun 2018	67

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Renstra Pusdiklat BPS 2015-2019	77
Lampiran 2. Reviu Renstra Pusdiklat BPS 2015-2019	78
Lampiran 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS 2018	79
Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja 2018	82
Lampiran 5. Jumlah Pegawai Di Lingkungan Pusdiklat BPS Menurut Jenis Jabatan Satuan Organisasi Tahun 2018	83
Lampiran 6. Jumlah Pejabat Fungsional pada Pusdiklat BPS Keadaan: Akhir Tahun 2018	84
Lampiran 7. Rintisan Pendidikan Gelar Pusdiklat BPS Tahun 2018	85
Lampiran 8. Diklat yang Diselenggarakan oleh Pusdiklat BPS Tahun 2018	86
Lampiran 9. Kalender Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan Tahun 2018	87
Lampiran 10. Kalender Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2018	88

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pusdiklat BPS disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat BPS atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, telah ditetapkan 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran strategis, dan 7 (tujuh) indikator kinerja yang harus dicapai Pusdiklat BPS pada tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Reviu Renstra Pusdiklat BPS 2015-2019.

Tujuan capaian kinerja Pusdiklat BPS adalah "Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima". Tujuan ini diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat. Pada tahun 2018, angka capaian kinerja menurut tujuan telah mencapai 96,76 persen. Dengan angka diatas 90 persen, hal ini menggambarkan bahwa secara umum kinerja Pusdiklat BPS tahun 2018 cukup memuaskan dengan mewujudkan layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima. Namun, diperlukan kerja keras lagi dari semua pihak agar capaian kinerja dapat mencapai sesuai target bahkan melebihi dari target yang diharapkan.

Tujuan tersebut dicapai dengan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima (2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan. Pada tahun 2018, rata-rata capaian kinerja yang diperoleh telah melebihi target atau diatas 100 persen yaitu mencapai 103,61 persen.

Pada sasaran strategis pertama, Pusdiklat BPS selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan diklat aparatur BPS yang prima dibuktikan dengan adanya perbaikan layanan terhadap peserta sehingga peserta dapat mengetahui, memahami dan menerapkan materi yang diajarkan widyaiswara/pengajar dengan baik. Perbaikan terjadi berkat kerjasama dan komitmen para penyelenggara untuk selalu memperbaiki layanan baik dari sisi teknis dalam proses pembelajaran seperti penyampaian materi oleh widyaiswara/pengajar maupun non teknis berupa sarana dan prasarana yang tersedia.

Perbaikan layanan yang telah dilakukan berpengaruh terhadap persentase kelulusan peserta diklat. Sejalan dengan itu, capaian kinerja dari indikator "Persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan", "Persentase peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik" dan "Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan jasa yang lulus" telah melampaui target yang ditetapkan dengan nilai berturut-turut adalah sebesar 105,43 persen, 104,07 persen dan 120 persen.

Angka kelulusan tersebut menunjukkan bahwa peserta diklat kepemimpinan III dan IV telah berhasil mengimplementasikan rencana proyek perubahan di tempat asal dengan mengubah pengelolaan kegiatan organisasinya ke dalam Proyek Perubahan (PP). Bagi peserta diklat prajabatan mereka telah berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS di tempat tugas masing-masing. Sementara itu, indikator sasaran "Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan" sesuai dengan target yang diharapkan (100 %).

Pada sasaran strategis yang kedua, Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan didukung oleh indikator "Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat". Indikator tersebut telah melebihi dari target yang diharapkan yaitu dengan realisasi 70,47 poin dari target PK 2018 sebesar 70 poin sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100,67 persen. Pusdiklat BPS dari tahun ke tahun selalu berupaya memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Meskipun secara rata-rata capaian indikator sasaran telah melebihi dari target yang diharapkan, masih terdapat indikator sasaran strategis yang menunjukkan capaiannya kurang dari 100 persen, yaitu: (1) indikator "Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat" dengan capaian kinerjanya sebesar 96,76 persen, dan (2) indikator "Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS" capaian kinerjanya sebesar 98,33 persen.

Untuk mengantisipasi hal ini perlu digali informasi lebih dalam lagi apakah perlu melakukan revisi terhadap target indikator tersebut atau mencari solusi untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penggalan lebih dalam lagi perlu dilakukan terutama pada proses perencanaan kegiatan tahun yang akan datang, agar target yang ditentukan tidak terlalu tinggi.

Salah satu kegiatan prioritas yang diselenggarakan Pusdiklat BPS pada tahun 2018 adalah Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III Reguler. Penempatan skala prioritas pada kegiatan diklat tersebut untuk mengantisipasi terkait peraturan pemerintah, yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang masa percobaan Calon PNS yang hanya berlaku 1 (satu) tahun. Sementara itu, untuk kegiatan diklat teknis yang masih menjadi prioritas adalah penyelenggaraan Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan ini untuk memenuhi kompetensi pegawai BPS dalam keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya kegiatan pengadaan barang dan jasa di BPS. Untuk menampung banyaknya peserta kegiatan tersebut, diklat ini diadakan sebanyak 9 (sembilan) kelas.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dari program dan kegiatan yang diusulkan, pada TA 2018 BPS mendapatkan pagu anggaran sebanyak Rp 64.370,17 juta direalisasikan anggaran sebanyak Rp 58.762,63 juta atau sekitar 91,29 persen. Untuk output Layanan Pendidikan dan Pelatihan direalisasikan anggaran sebesar 90,77 persen yaitu Rp 42.464,32 juta dari pagu anggaran Rp 46.782,84 juta. Penyerapan anggaran pada output Layanan Perkantoran adalah sebesar 92,68 persen yaitu Rp 15.464,80 juta dari pagu anggaran Rp 16.685,99 juta, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang. Sementara itu, pada Program PSPA yaitu output Layanan Internal direalisasikan sebesar 92,48 persen, yaitu Rp 833,52 juta dari pagu anggaran Rp 901,34 juta berupa belanja modal terdiri dari belanja gedung dan bangunan dan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.

BAB I

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki struktur organisasi di bidang teknis, sekretariat dan pengawasan. Struktur bidang sekretariat terdiri dari biro perencanaan, administrasi keuangan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) BPS, biro umum, hubungan masyarakat maupun kepegawaian dan hukum.

Pada pengembangan SDM BPS, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik (Pusdiklat BPS) sebagai satuan kerja (satker)/perangkat organisasi yang berfungsi untuk meningkatkan kompetensi SDM organisasi BPS seluruh Indonesia. Menurut Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS, pada Bab X Pasal 393 disebutkan bahwa Pusdiklat BPS mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan, serta teknis dan fungsional.

Pusdiklat BPS adalah unsur pelaksana BPS berperan penting dalam meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara di bidang pendidikan dan pelatihan (Diklat) dalam hal ini pegawai di lingkungan BPS maupun pemangku kepentingan (stakeholder) BPS secara umum. Selain itu juga mengelola tugas belajar dan izin belajar serta mengadakan seminar/workshop yang berkaitan dengan statistik dan teknologi informasi.

Berdasarkan Reviu Renstra Pusdiklat BPS Tahun 2015-2019, visi yang dicapai pada tahun 2018 adalah "Pusdiklat BPS sebagai Pusat Unggulan Pelatihan Statistik dan Teknologi Informasi dalam Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur Negara yang Kompeten dan Profesional, Berintegritas serta Amanah". Dalam pencapaian visi tersebut disusunlah misi pertama yaitu mengembangkan dan menyempurnakan sistem, kurikulum, silabi, modul pembelajaran yang berorientasi pada upaya peningkatan penguasaan statistik dan teknologi komputasi yang berbasis kompetensi sesuai standar statistik internasional; kedua, meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan dan pengembangan program Diklat statistik dan komputasi yang memiliki kualitas akademik secara profesional yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks; ketiga, meningkatkan kualitas tenaga pengajar serta pengelola Diklat serta tenaga kediklatan lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja statistik; dan yang keempat, menyempurnakan dan meningkatkan sarana dan prasarana Diklat statistik dan komputasi yang memadai.

Sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2018 yaitu meningkatnya layanan Diklat aparatur BPS yang prima serta meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan. Dari setiap sasaran strategis tersebut dibuatlah 7 (tujuh) indikator sasaran strategis. Selanjutnya berdasarkan indikator tersebut Pusdiklat BPS menetapkan target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) di awal tahun 2018.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Pasal 18 menyebutkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun akan dimonitoring setiap triwulanan dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja interim (triwulanan) dan laporan kinerja tahunan pada akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran, terutama indikator sasaran strategis melalui tingginya capaian kinerja yang telah diraih satker pada instansi pemerintah. Selain itu sebagai evaluasi atau upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam meningkatkan kinerjanya untuk tahun yang akan datang, dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pedoman penyusunan Laporan Kinerja bagi setiap instansi pemerintah tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2018 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Pusdiklat BPS kepada Kepala BPS atas pelaksanaan program/kegiatan serta pengelolaan anggaran dan barang milik Negara dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran Pusdiklat BPS selama tahun 2018.

1.3. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

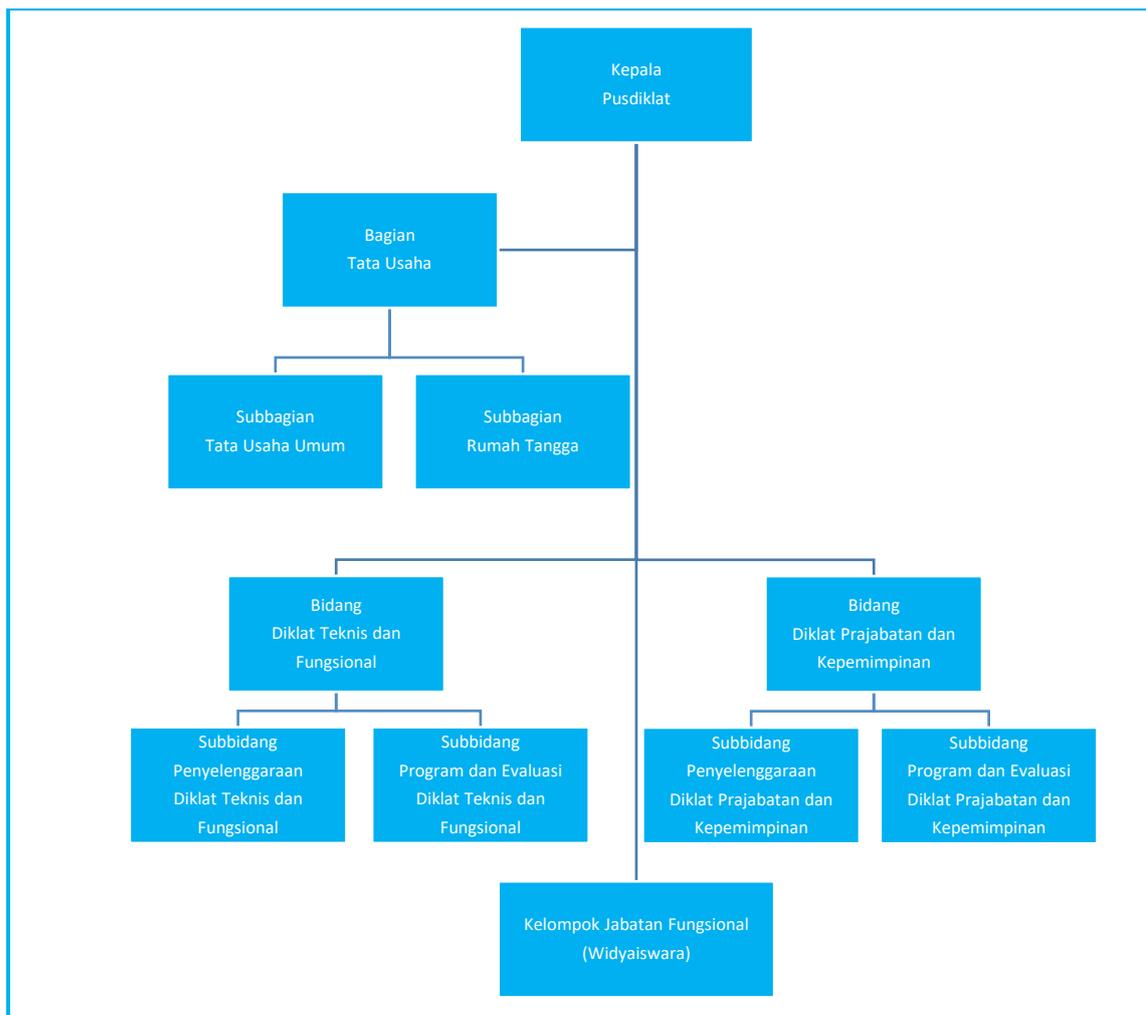
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2008 tentang Badan Pusat Statistik yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala BPS Nomor 1 Tahun

2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, maka tugas, fungsi dan struktur organisasi Pusdiklat BPS adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan
Pusdiklat merupakan unit kerja setingkat Eselon II pada BPS yang berlokasi di Jalan Raya Jagakarsa No. 70. Jakarta Selatan 12620.
2. Tugas
Pusdiklat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud di atas, pusdiklat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan tata usaha
 - b. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan
 - c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
4. Susunan Organisasi
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, struktur organisasi Pusdiklat adalah sebagai berikut:
 1. Kepala
Kepala Pusdiklat BPS adalah pejabat Eselon IIa
 2. Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang pejabat Eselon IIIa, yaitu Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahi dua Kepala Subbagian setingkat Eselon IVa yaitu:
 - a. Subbagian Tata Usaha Umum; dan
 - b. Subbagian Rumah Tangga
 3. Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan
Bidang ini dipimpin oleh seorang pejabat Eselon IIIa, yaitu Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan yang membawahi dua Kepala Subbidang setingkat Eselon IVa yaitu:

- a. Subbidang Penyusunan Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan; dan
 - b. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan
4. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional
- Bidang ini dipimpin oleh seorang pejabat Eselon IIIa, yaitu Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional yang membawahi dua Kepala Subbidang setingkat Eselon IVa yaitu:
- a. Subbidang Penyusunan Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional; dan
 - b. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional
5. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Jabatan Fungsional Widyaiswara.

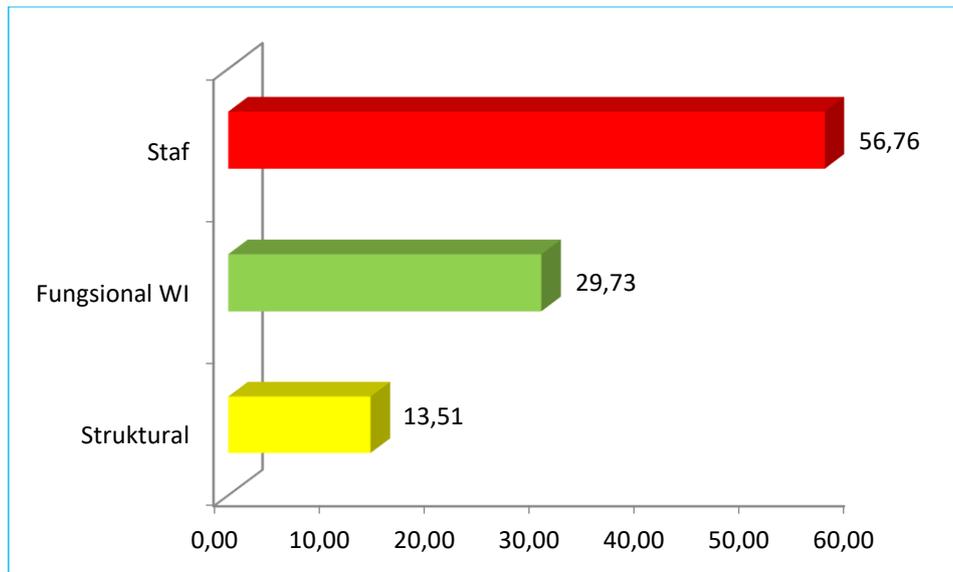
Bagan Struktur Organisasi Pusdiklat BPS dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusdiklat BPS

1.4. Sumber Daya Manusia (SDM)

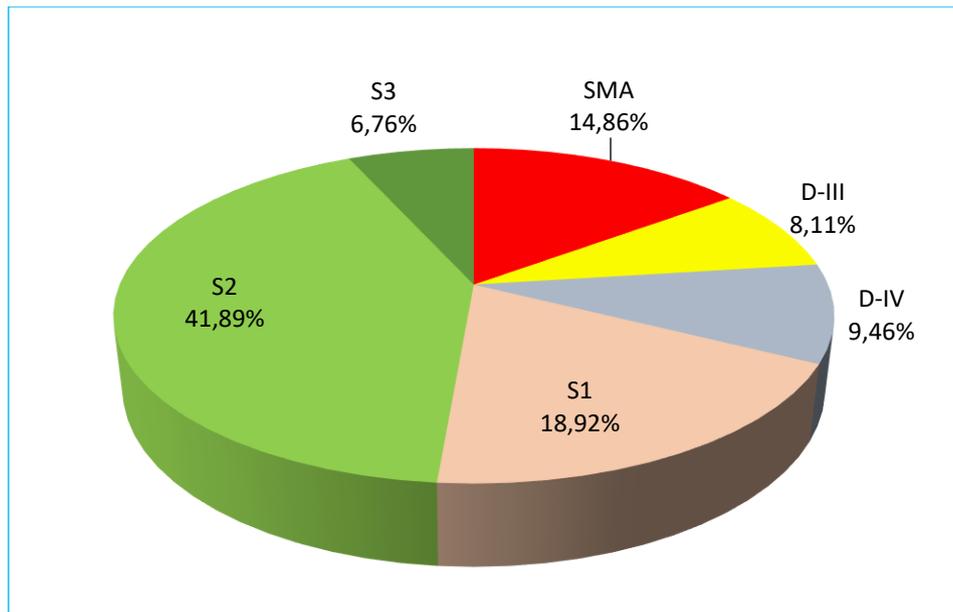
Pada akhir tahun 2018, SDM Pusdiklat BPS seluruhnya berjumlah 74 pegawai yang terdiri dari 13,51 persen adalah pegawai pejabat struktural, 28,38 persen adalah pegawai pejabat fungsional widyaiswara, dan 58,11 persen pegawai adalah staf (Gambar 2). Masing-masing jabatan tersebut mempunyai peran yang sangat penting untuk pengembangan diklat yang diselenggarakan Pusdiklat BPS.



Gambar 2. Komposisi SDM Pusdiklat BPS menurut Jabatan

Keberhasilan Pusdiklat BPS dalam menyelenggarakan diklat tidak terlepas dari peranan para pengajar diklat. Pejabat fungsional widyaiswara merupakan SDM Pusdiklat BPS yang berperan sebagai tenaga pengajar diklat. Fungsional widyaiswara di Pusdiklat BPS berjumlah 22 orang terdiri dari 1 orang Fungsional Pertama, 11 orang Fungsional Muda, 9 orang Fungsional Madya, dan 1 orang Fungsional Utama. Semakin berkembangnya diklat yang diselenggarakan di Pusdiklat BPS, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pegawai BPS yang secara tidak langsung juga mendukung data BPS yang lebih berkualitas.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat BPS, dibutuhkan SDM yang berkualitas. Salah satu unsur yang secara tidak langsung berperan dalam peningkatan kualitas SDM adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan. Berdasarkan Gambar 3 diperoleh gambaran bahwa pada tahun 2018 komposisi SDM terbesar berada pada tingkat pendidikan S2 yaitu mencapai 41,89 persen. Bahkan jika dilihat komposisi SDM dengan minimal pendidikan D-III telah mencapai 85,14 persen dari total keseluruhan pegawai sebanyak 74 orang. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum SDM Pusdiklat BPS telah mencerminkan kualitas yang cukup baik sehingga dapat mendukung keberhasilan pencapaian kinerja ke arah yang lebih baik.



Gambar 3. Komposisi SDM Pusdiklat BPS menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

1.5. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka mewujudkan layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima, Pusdiklat sebagai penyelenggara diklat mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat besar untuk lebih meningkatkan pelayanan, baik dari sisi peningkatan kualitas SDM maupun peningkatan materi diklat yang beragam sesuai dengan yang dibutuhkan BPS.

Dalam rangka menghadapi tantangan Pusdiklat untuk lebih meningkatkan pelayanan, banyak kendala/permasalahan yang dihadapi baik dari sisi Pusdiklat sebagai penyelenggara diklat maupun dari sisi peserta dan aturan-aturan yang diterapkan dari pihak LAN RI.

Pada tahun 2018, Pusdiklat BPS melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III. Berdasarkan Perka LAN Nomor 25 Tahun 2017, pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dilaksanakan selama 113 hari kerja atau 1.141 Jam Pelatihan (JP), dengan perincian 33 hari kerja atau setara dengan 288 JP untuk pembelajaran klasikal dan 80 hari kerja atau setara dengan 853 JP untuk pembelajaran non klasikal atau aktualisasi di tempat kerja. Jangka waktu pelaksanaan diklat yang membutuhkan waktu lama dengan jumlah peserta juga banyak sehingga pelaksanaan seminar tidak dapat dilakukan pada tahun 2018 saja, melainkan berakhir hingga Januari 2019.

Dengan pola pembelajaran seperti di atas, berdampak pada ketersediaan kamar dimana Asrama Pusdiklat hanya bisa menampung sebanyak maksimal 150 orang (kelas) secara bersamaan. Sementara itu, proses pemberkasan pengurusan SK PNS harus diselesaikan

sebelum Februari. Konsekuensinya adalah waktu pelaksanaan kegiatan Latsar CPNS Golongan III BPS Angkatan XXII dan XXII (Batch V) diubah menjadi **26 Agustus 2018 – 25 Januari 2019, sementara** Latsar CPNS Golongan III BPS Angkatan XXIII dan XXIV (Batch VI) menjadi 2 September 2018 – **1 Februari 2019**.

Permasalahan yang juga terjadi pada pelaksanaan latsar adalah pada pola baru tersebut, peserta diwajibkan untuk menyusun, menginventarisir permasalahan yang ada di unit kerja terkait dengan pelaksanaan tugas. Sementara masa tugas peserta di unit kerja baru beberapa minggu saja yang tentunya belum mengetahui permasalahan yang ada di unit kerja terkait dengan pelaksanaan tugas tersebut. Oleh karena itu pada tahun berikutnya, pelaksanaan latsar diharapkan diselenggarakan setelah peserta menjalankan tugas di unit kerja penempatan 4-5 bulan.

Pada pelaksanaan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV dan III dengan Pola Baru, mewajibkan peserta membuat dan mengimplementasikan Proyek Perubahan (PP). Implementasi PP dari Inovasi yang dibuat peserta dilaksanakan di tempat tugasnya selama kurang lebih 2 bulan. Permasalahan muncul manakala peserta yang sedang mengimplementasikan PP tersebut harus mengalami mutasi karena kebutuhan organisasi, sehingga menjadi kendala yang sangat mengganggu dalam keberhasilan peserta diklat dalam mengimplementasikan PP nya. Untuk itu diharapkan pada masa yang akan datang dilakukan koordinasi yang kuat antara Pusdiklat, Biro Kepegawaian dan Unit Kerja peserta Diklat agar tidak dilakukan mutasi bagi pejabat yang sedang mengikuti Diklat Kepemimpinan.

Berdasarkan data nominasi peserta Diklatpim Tingkat IV, jumlah pegawai yang belum mengikuti Diklat sekitar 500-an orang, namun karena ketersediaan tempat dan anggaran, pada tahun 2018 ini Pusdiklat BPS hanya bisa menyelenggarakan sebanyak 6 angkatan (209 orang). Diharapkan pada tahun berikutnya BPS bisa menyelenggarakan Diklatpim Tingkat IV melalui pola kerjasama dengan BPS daerah atau lembaga diklat di daerah sehingga pegawai BPS yang belum mengikuti menjadi semakin berkurang, mengingat setiap tahunnya jumlah pegawai yang dilantik menjadi pejabat eselon IV atau pengawas selalu bertambah.

Sejalan dengan semakin beragam kebutuhan diklat, terutama diklat teknis dan fungsional, dibutuhkan tenaga pengajar/widyaiswara yang sesuai dengan kompetensinya, hal ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Selain itu, Pusdiklat juga harus menerapkan Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan dengan pola baru yang diatur oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kendala yang dihadapi adalah kurangnya widyaiswara dengan kompetensi pola baru tersebut. Untuk mengatasi kendala diatas telah dilakukan peningkatan kualifikasi dan

kompetensi para pengajar melalui berbagai diklat, tugas belajar dan Diklat *Training of Trainers* (TOT) Substansi Kewidyaiswaraan Pim III dan IV kerjasama Pusdiklat BPS dan LAN RI. Dengan telah diselenggarakannya TOF Latsar pada akhir tahun 2016 dan TOT Substansi DiklatPim IV pada bulan Oktober 2017 yang diikuti oleh seluruh Widyaiswara dan pejabat struktural, maka ini menjadi potensi yang unggul dalam meningkatkan kompetensi Widyaiswara dan Penyelenggara LATSAR dan DIKLATPIM IV dan III.

Sementara itu, kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Teknis dan Fungsional adalah pada Diklat Fungsional Pranata Komputer masih kurangnya peminat diklat tersebut di lingkungan BPS sendiri dibandingkan dengan kementerian/lembaga/instansi lain. Sehingga target kuota peserta diklat tidak tercapai.

Sedangkan pada Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat kendala batas waktu antara pendaftaran pelatihan dan ujian *on-line* terlalu singkat yaitu 2 minggu dan aplikasi pendaftaran dari LKPP kurang mudah dipahami, selain itu calon peserta diklat dari BPS Provinsi banyak mengalami pergantian. Antisipasi yang dilakukan adalah menunjuk salah satu staf sebagai PIC dalam melakukan pendaftaran *on-line*.

Di sisi lain, dalam menghadapi tantangan era milenial dibutuhkan sarana dan prasarana Teknologi dan Informasi yang memadai agar dapat meningkatkan pelayanan diklat. Kendala server yang masih ada yang rusak dan belum memadai, terutama untuk menghadapi kegiatan diklat melalui e-learning. Selain itu, server yang mengalami kerusakan membuat Simdiklat tidak dapat beroperasi selama 2-3 minggu. Hal ini membuat peserta tidak dapat mengakses Simdiklat. Dan data-data peserta yang telah ter*upload* di Simdiklat hilang. Peserta tidak dapat mengakses evaluasi pengajar, evaluasi penyelenggaraan, dan evaluasi katering. Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan perbaikan server dan menambah server yang ada sehingga kendala mengenai server dapat diatasi.

Kendala yang dihadapi pada sarana dan prasarana gedung adalah AC yang terletak di ruang aula mengalami kerusakan/kurang dingin. Untuk sementara dapat diatasi dengan perbaikan dan pemeliharaan AC, sebelum ada penambahan dengan yang baru karena AC yang ada sudah kurang memadai.

Sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan peserta diklat adalah ketersediaan printer. Saat ini masih terbatas sehingga menjadi kendala bagi peserta diklat bila harus mencetak tugas-tugas peserta secara bersamaan dalam waktu yang terbatas. Namun demikian Pusdiklat telah memiliki sarana dan prasarana pendukung kediklatan berupa fasilitas

Karaoke, Fitness dan lapangan olah raga untuk selalu menjaga kebugaran peserta baik secara fisik maupun mental.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja Pusdiklat BPS tahun 2018 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. **Pendahuluan**, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan; tugas, fungsi, dan susunan organisasi; sumberdaya manusia (SDM); potensi dan permasalahan; serta sistematika penyajian laporan.
- Bab II. **Perencanaan Kinerja**, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Pusdiklat BPS 2018.
- Bab III. **Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi Capaian Kinerja Pusdiklat BPS 2018; Capaian Kinerja Pusdiklat BPS terhadap Target Renstra 2018 dan 2019; Upaya Efisiensi Pusdiklat BPS 2018; dan Realisasi Anggaran tahun 2018.
- Bab IV. **Penutup**, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS 2015-2019

Berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, Pusdiklat BPS menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang Statistik.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS 2015-2019. Renstra tersebut dijadikan sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja seluruh aparat Pusdiklat BPS dalam menjalankan tugas dan fungsi pelaksanaan pembangunan statistik, utamanya dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Sejalan dengan tugas dan fungsinya sebagai instansi yang menyelenggarakan diklat, Renstra Pusdiklat BPS 2015-2019 memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang berkontribusi untuk pengembangan SDM. Visi yang disusun Pusdiklat BPS untuk mewujudkan kontribusi tersebut sebagaimana tercantum dalam Renstra 2015-2019 adalah:

"Pusdiklat BPS sebagai pusat unggulan pelatihan statistik dan teknologi informasi dalam pengembangan kapasitas SDM aparatur negara yang kompeten dan profesional, berintegritas serta amanah"

Visi Pusdiklat BPS tersebut sejalan dengan arah pembangunan BPS sebagaimana termuat dalam Renstra BPS 2015-2019 dengan visi "Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua" dan sesuai dengan misi BPS untuk menyediakan data statistik yang berkualitas, memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan, dan membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah.

Pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan amanah (PIA) menjadi sangat penting diwujudkan dalam rangka pembangunan bidang SDM.



Gambar 4. Nilai Inti BPS

➤ **Profesional**

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

➤ **Integritas**

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

➤ **Amanah**

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

Dengan Visi Pusdiklat BPS 2015-2019, eksistensi Pusdiklat BPS sebagai pusat pendidikan dan pelatihan statistik menjadi semakin penting, karena sangat berperan dalam pembangunan bidang SDM guna menunjang upaya BPS meningkatkan penyediaan data yang berkualitas. Selain itu, visi Pusdiklat BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dan berperan aktif di bidang statistik melalui keikutsertaan aparaturnya dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pusdiklat BPS.

Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut: :

1. Mengembangkan dan menyempurnakan sistem, kurikulum, silabi, modul pembelajaran yang berorientasi pada upaya peningkatan penguasaan statistik dan teknologi komputasi yang berbasis kompetensi sesuai standar statistik internasional.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan statistik dan komputasi yang memiliki kualitas akademik

secara profesional yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks.

3. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar serta pengelola pendidikan dan pelatihan serta tenaga kediklatan lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja statistik.
4. Menyempurnakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan statistik dan komputasi yang memadai.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pusdiklat BPS 2015-2019, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Mulai tahun 2017, terdapat perbedaan tujuan dan sasaran strategis sehingga dibuat Review Renstra 2015-2019. Berdasarkan Review Renstra tersebut, tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Pusdiklat BPS 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
T. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima	SS1. Meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima
	SS2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan

Berdasarkan Tabel 1 diatas, Pusdiklat BPS mempunyai satu tujuan dan dua sasaran strategis yang masing-masing memiliki indikator yang terukur sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaian kerjanya. Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Pusdiklat BPS dapat dilihat pada gambar 5 berikut:

“Pusdiklat BPS sebagai pusat unggulan pelatihan statistik dan teknologi informasi dalam pengembangan kapasitas SDM aparatur negara yang kompeten dan profesional, berintegritas serta amanah”



MISI



T1



SS1

SS2

Gambar 5. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pusdiklat BPS

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Pusdiklat BPS Tahun 2018

Pada awal tahun ditetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun. Target yang telah ditetapkan menjadi acuan capaian atau realisasi kinerja instansi. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Target Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Di dalam Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS, target yang ditetapkan berasal dari beberapa indikator kinerja yang dapat mewakili hasil kinerja dari masing-masing sasaran strategis. Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitor setiap triwulanan, kemudian

dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2018

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan : Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima	Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	92,50
Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima	Persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	Persen	92,00
	Persentase peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	Persen	85,00
	Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus	Persen	70,00
	Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	92,50
	Persentase Surat Ijin Belajar yang diselesaikan	Persen	100,00
	Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS	Pegawai	120
Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	70

Perjanjian Kinerja yang disusun selanjutnya diturunkan ke dalam perjanjian kinerja pada tingkat unit kerja Eselon III dan Eselon IV. Karena itu setiap unit kerja mempunyai kontribusi terhadap penyusunan target kinerja Pusdiklat BPS. Peranan unit kerja Eselon III pada setiap penyusunan target indikator dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kontribusi Unit Kerja Terhadap Penyusunan Target Indikator

Sasaran/Indikator	Bagian Tata Usaha	Bidang DPK	Bidang DTF
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima			
Persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	★		★
Persentase peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	★	★	
Persentase peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang lulus	★	★	
Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	★		
Persentase Surat Ijin Belajar yang diselesaikan			
Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS			
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan			
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat		★	★

Keterangan:  : Penanggung Jawab ★ : Kontributor

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA





AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2018

Berdasarkan pencapaian dari indikator-indikator kinerja sasaran strategis selama tahun 2018, diperoleh capaian kinerja Pusdiklat BPS tahun 2018. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing sasaran. Indikator kinerja yang dimaksud merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki target pada Perjanjian Kinerja 2018 dan data realisasinya dapat diperoleh sesuai kegiatan yang dilakukan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pusdiklat BPS. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis

Pusdiklat BPS mempunyai satu tujuan capaian kinerja yaitu "Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima", diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat. Tujuan tersebut dicapai dengan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima (2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel 4.

Bila dilihat menurut indikator tujuan yaitu "Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima", rata-rata capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 96,76 persen (Tabel 4). Dengan angka diatas 90 persen, hal ini menggambarkan bahwa secara umum kinerja Pusdiklat BPS tahun 2018 cukup memuaskan dengan mewujudkan layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima. Namun, diperlukan kerja keras lagi dari semua pihak agar capaian kinerja dapat mencapai sesuai target bahkan melebihi dari target yang diharapkan.

Tabel 4. Rata-rata Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2018

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T: Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima				
Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	92,50	89,51	96,76
SS1: Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima				
Persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	Persen	92,00	97,00	105,43
Persentase peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	Persen	95,00	98,87	104,07
Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus	Persen	70,00	86,14	120,00
Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	92,50	89,51	96,76
Persentase Surat Ijin Belajar yang diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00
Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS	Pegawai	120	118	98,33
SS2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan				
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	70	70,47	100,67
Rata-rata Capaian Indikator Tujuan				96,76
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				103,61

Di sisi lain, jika dilihat menurut indikator sasaran, yaitu "Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima" serta "Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan", rata-rata capaian kinerja yang diperoleh telah melebihi target atau diatas 100 persen yaitu mencapai 103,61 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari masing-masing indikator sasaran strategis yang sebagian besar capaian kerjanya lebih dari 100 persen.

Indikator sasaran strategis yang menunjukkan capaiannya lebih dari 100 persen adalah "Persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan" (105,43 %), "Persentase peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik" (104,07 %), dan "Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan

jasa yang lulus (120 %). Hal ini menunjukkan bahwa peserta diklat dapat menerima materi dengan baik berkat bimbingan dan arahan dari pengajar/widyaiswara. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat juga telah sedikit melebihi dari target yang diharapkan dengan capaian kinerja sebesar 100,67 persen. Sementara itu, indikator sasaran "Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan" sesuai dengan target yang diharapkan (100 %).

Meskipun secara rata-rata capaian indikator sasaran telah lebih dari target yang diharapkan, masih terdapat indikator sasaran strategis yang menunjukkan capaiannya kurang dari 100 persen, yaitu: (1) indikator "Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat" dengan capaian kinerjanya sebesar 96,76 persen, dan (2) indikator "Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS" capaian kinerjanya sebesar 98,33 persen.

Pada indikator "Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat", capaian kinerjanya dapat dikatakan cukup memuaskan meskipun kurang dari 100 persen. Salah satu hal yang menyebabkan capaian kinerja tidak mencapai target adalah ketidakpuasan peserta Pelatihan Dasar (Latsar) Golongan III Batch 2 yang mengalami perbedaan waktu pelaksanaan ujian/evaluasi akademik dengan angkatan lainnya, akibat adanya hari libur nasional di akhir waktu pembelajaran dan ketidakpuasan peserta Latsar Golongan III Batch 5 s.d. 6 yang mengalami perubahan waktu pelaksanaan Diklat, dimana pada awal Kalender Diklat dijadwalkan pada minggu ketiga dan keempat Bulan September dimajukan menjadi minggu ketiga Bulan Agustus dan minggu pertama Bulan September. Selain itu, ketidakpuasan peserta juga dipengaruhi oleh tempat pelaksanaan Diklat. Untuk Latsar Golongan III Batch 5 s.d. 6 pelatihan diselenggarakan di luar Pusdiklat BPS karena keterbatasan kamar Asrama Pusdiklat BPS yang hanya bisa menampung maksimal sebanyak 150 peserta Diklat.

Indikator kedua yang capaian kinerjanya kurang dari target yang diharapkan adalah "Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS". Penyelenggaraan program beasiswa APBN BPS merupakan salah satu wujud layanan Pusdiklat untuk mengakomodir pegawai BPS melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga akan diperoleh SDM yang lebih berkualitas. Namun pada tahun 2018, capaiannya tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Dari target sebanyak 120 pegawai, terealisasi 118 pegawai mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS. Hal ini dikarenakan terdapat 2 orang calon peserta tugas belajar yang tidak lulus pada saat mengikuti tes akademik di Universitas.

Keberhasilan Pusdiklat BPS dalam mencapai target kinerja bahkan melebihi dari yang telah ditargetkan, hal ini tidak terlepas dari peranan masing-masing indikator kinerja yang memberikan sumbangan cukup besar meskipun masih ada beberapa indikator yang belum

berhasil mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai usaha akan terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2018 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2017

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan yang tertuang dalam indikator kinerja.

Dalam rangka mewujudkan visi Pusdiklat BPS yaitu "Pusdiklat BPS sebagai pusat unggulan pelatihan statistik dan teknologi informasi dalam pengembangan kapasitas SDM aparatur negara yang kompeten dan profesional, berintegritas serta amanah", ditetapkan tujuan capaian kinerja yaitu "Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima".

Tujuan capaian kinerja Pusdiklat BPS digambarkan melalui indikator Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat. Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa berdasarkan target PK 2017 sebesar 92,33 persen diperoleh realisasi persentase kepuasan peserta diklat sebesar 89,45 persen. Dari angka tersebut dihasilkan capaian kinerja tujuan sebesar 96,88 persen. Hal ini menggambarkan bahwa hampir seluruh peserta diklat merasakan kepuasan terhadap penyelenggaraan diklat, meskipun belum 100 persen mengingat masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik.

Tabel 5. Capaian Kinerja Tujuan : Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima Tahun 2018

IKU	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)	Realisasi 2017	Perubahan terhadap realisasi 2017 (%)
					$((3)/(5)*100)-100$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	92,50	89,51	96,76	89,45	0,07

SASARAN 1 : MENINGKATNYA LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR BPS YANG PRIMA

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik disebutkan bahwa Pusdiklat BPS mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

Selain kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, Pusdiklat juga menyelenggarakan pengelolaan Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi pegawai BPS yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima Tahun 2018

IKU	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)	Realisasi 2017	Perubahan terhadap realisasi 2017 (%) ((3)/(5)*100)-100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	92,00	97,00	105,43	99	-2,02
Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	95,00	98,87	104,07	97,50	1,41
Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus	70,00	86,14	120,00	80	7,68
Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	92,50	89,51	96,76	89,45	0,07
Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	100	0
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS	120	118	98,33	121	-2,48
Rata rata Capaian Kinerja			104,10		

Sejalan dengan itu, sasaran pertama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja adalah meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima. Keberhasilan sasaran Pusdiklat BPS dalam aspek layanan pendidikan dan pelatihan diukur melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran ini dapat dikatakan telah tercapai bahkan melebihi target dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 104,10 persen. Target dan pencapaian tahun 2018 serta perbandingan terhadap realisasi tahun 2017 pada masing-masing IKU dapat dilihat pada Tabel 6.

Bila dibandingkan dengan target 2018, pada sasaran pertama terdapat 3 (tiga) IKU yang tingkat capaian kerjanya melampaui dari target yang ditetapkan. Indikator tersebut adalah Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan, indikator Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik, dan Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus. Sementara itu, hanya 1 (satu) IKU yang sesuai dengan target yaitu indikator Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan. Sedangkan untuk indikator yang kurang dari target terdapat 2 (dua) indikator yaitu indikator Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat dan indikator Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS. Indikator-indikator tersebut secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

1. IKU 1 : Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang Lulus dengan Kategori Memuaskan

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas pegawai, diperlukan peningkatan kapasitas SDM yang memadai baik dari sisi kemampuan teknis maupun manajerial. Peningkatan kapasitas SDM tersebut dilakukan melalui pembinaan pegawai baik berupa diklat prajabatan maupun diklat kepemimpinan. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III mulai tahun 2017 Diklat Prajabatan berubah nomenklatur menjadi Pelatihan Dasar (Latsar) Calon PNS Golongan III.

Pada tahun 2018, Pusdiklat BPS telah menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III. Selama diklat berlangsung, penyelenggara melakukan evaluasi dan penilaian terhadap peserta yang mencakup aspek sikap, perilaku, disiplin, dan akademis. Klasifikasi peserta berdasarkan predikat kelulusan adalah sangat memuaskan dengan nilai lebih dari 90,1; memuaskan dengan nilai 80,1-90; cukup memuaskan dengan nilai 70,1-80; kurang memuaskan dengan nilai 60,1-70; dan tidak memuaskan (tidak lulus) dengan nilai kurang dari 60.

Berdasarkan pencapaian nilai peserta, tingkat capaian kinerja pada indikator persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan telah melebihi target yang diharapkan yaitu mencapai 105,43 persen. Angka tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 97 persen dibandingkan target PK 2018 sebesar 92 persen. Capaian kinerja tersebut menggambarkan hasil yang sangat memuaskan.

Angka kelulusan yang telah melebihi target menunjukkan bahwa peserta diklat kepemimpinan III dan IV telah berhasil mengimplementasikan rencana proyek perubahan di tempat asal dengan mengubah pengelolaan kegiatan organisasinya ke dalam Proyek Perubahan (PP). Bagi peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III mereka telah berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS di tempat tugas masing-masing. Capaian kinerja yang cukup tinggi juga tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan diklat, yaitu pimpinan/pejabat struktural, widyaiswara/pengajar, dan seluruh staf Pusdiklat BPS. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang sebesar 99 persen, maka terjadi penurunan sebesar 2,02 persen.

Informasi mengenai Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan Diklat Kepemimpinan yang telah diselenggarakan Pusdiklat BPS pada tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

1.1. Pelatihan Dasar CPNS Golongan III

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Diklat PNS), ditetapkan jenis diklat secara umum adalah Diklat Prajabatan dan Diklat dalam Jabatan. Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS. Diklat ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, dan budaya kerja organisasi agar mampu melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Perka LAN) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, maka sejak Tahun 2017 Diklat Prajabatan Golongan III berubah nomenklatur menjadi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III.



Gambar 6. Kegiatan Pembukaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III

Pada tahun 2018, Pusdiklat BPS melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III. Berdasarkan Perka LAN Nomor 25 Tahun 2017, pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dilaksanakan selama 113 hari kerja atau 1141 Jam Pelatihan (JP), dengan perincian 33 hari kerja atau setara dengan 288 JP untuk pembelajaran klasikal dan 80 hari kerja atau setara dengan 853 JP untuk pembelajaran non klasikal atau aktualisasi di tempat kerja. Struktur kurikulum Pelatihan Dasar CPNS Golongan III terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu Kurikulum Pembentukan Karakter PNS dan Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas. Kurikulum pembentukan karakter PNS, terdiri dari 4 (empat) Agenda, yaitu Agenda Sikap Perilaku Bela Negara, Agenda Nilai-nilai Dasar PNS, Agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI, dan Agenda Habitiasi. Sedangkan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas terdiri dari 2 (dua), yaitu Kompetensi teknis umum/administrasi dan Kompetensi teknis substantif.



Gambar 7. Kegiatan Pembelajaran Pelatihan Dasar CPNS Golongan III

Metode pembelajaran yang digunakan dalam Pelatihan Dasar CPNS Golongan III ini adalah ceramah yang dikombinasi dengan tanya jawab, diskusi kelompok, permainan, pendalaman materi dan seminar. Pada tahun 2018 Pusdiklat BPS melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III sebanyak 12 angkatan (6 *batch*) yaitu Angkatan XIII sampai dengan XXIV dengan peserta sebanyak 440 orang. Pelaksanaan seminar akhir evaluasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XIII s.d. XVI (*batch* 1 dan 2) dilakukan pada Bulan Desember 2018. Sedangkan seminar akhir evaluasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XVII s.d. XXIV (*batch* 3 s.d. 6) berakhir pada Bulan Januari 2019.

Terdapat permasalahan dimana dalam pelaksanaan kegiatan Latsar CPNS Golongan III BPS Angkatan XXI dan XXII (Batch V) serta Angkatan XXIII dan XXIV (Batch VI) yang rencananya berakhir bulan Februari 2019 terkendala dengan syarat proses pemberkasan SK PNS oleh Biro Kepegawaian yang ternyata harus diselesaikan sebelum bulan Februari 2019.

Mengingat Asrama Pusdiklat hanya bisa menampung sebanyak maksimal 150 orang (kelas) secara bersamaan sementara proses pemberkasan pengurusan SK PNS harus diselesaikan sebelum Februari, maka waktu pelaksanaan kegiatan Latsar CPNS Golongan III BPS Angkatan XXII dan XXII (Batch V) diubah menjadi 26 Agustus 2018 – 25 Januari 2019, sementara Latsar

CPNS Golongan III BPS Angkatan XXIII dan XXIV (Batch VI) menjadi 2 September 2018 – 1 Februari 2019.

1.2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) bertujuan membentuk moral, kompetensi, dan sikap PNS untuk menduduki jabatan eselon tertentu. Pusdiklat BPS pada tahun 2018 menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat IV dan tingkat III.

1.2.1. Diklatpim Tingkat IV

Diklatpim tingkat IV bertujuan membentuk kompetensi kepemimpinan operasional dan membentuk pemimpin perubahan pada pejabat struktural eselon IV yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Melalui Diklatpim diharapkan setiap peserta diklat memiliki kemampuan melaksanakan pelayanan publik pada sektor yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, melalui diklat ini diharapkan terwujudnya kesamaan visi dan misi, serta dapat melaksanakan dan meningkatkan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat.



Gambar 8. Kegiatan Pembukaan Diklatpim Tingkat IV

Proses kegiatan Diklat dilakukan dengan pendekatan proses belajar orang dewasa (andragogi). Berdasarkan pendekatan ini maka metode yang digunakan adalah ceramah/kuliah, diskusi, seminar, praktek, simulasi, studi kasus dan observasi lapangan.

Pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV mulai tahun 2014 ini dilakukan dengan Pola Baru yang masing-masing dilaksanakan dalam 5 tahap dengan sistem "On Campus dan Off Campus". Tahap 1 adalah tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi yang dilaksanakan secara "On Campus" selama 11 hari. Tahap 2 adalah tahap "Taking Ownership" atau *Breakthrough 1* yang dilaksanakan secara "Off Campus" selama 5 hari di tempat kerja asal. Tahap 3 adalah tahap Merancang Perubahan dan Membangun tim, yang dilakukan selama 17 hari. Selanjutnya adalah Tahap 4 yang merupakan *Breakthrough 2* atau *Leadership Laboratory* atau juga implementasi Proyek Perubahan yang dilakukan selama 60 hari di tempat asal peserta Diklat. Tahap terakhir atau tahap 5 adalah tahap Evaluasi yang standarnya dilakukan secara "On Campus" di Pusdiklat atau di Ibukota Provinsi asal peserta. BPS bekerja sama dengan LAN RI pada tahun anggaran 2018, telah melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 6 angkatan yaitu Angkatan ke-102 sampai dengan Angkatan ke-107 dengan jumlah peserta sebanyak 209 orang.



Gambar 9. Kegiatan Pembelajaran Diklatpim Tingkat IV

1.2.2. Diklatpim Tingkat III

Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat III bertujuan meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon III yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Melalui Diklatpim diharapkan setiap peserta diklat memiliki kemampuan melaksanakan pelayanan publik pada sektor yang menjadi

tanggung jawabnya. Selain itu, melalui diklat ini diharapkan terwujudnya kesamaan visi dan misi, serta dapat melaksanakan dan meningkatkan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat.



Gambar 10. Kegiatan Pembukaan Diklatpim Tingkat III

Proses kegiatan Diklat dilakukan dengan pendekatan proses belajar orang dewasa (andragogi). Berdasarkan pendekatan ini maka metode yang digunakan adalah ceramah/kuliah, diskusi, seminar, praktek, simulasi, studi kasus dan observasi lapangan. Seperti halnya Diklatpim Tingkat IV, pelaksanaan Diklatpim Tingkat III mulai tahun 2014 ini dilakukan dengan Pola Baru yang masing-masing dilaksanakan dalam 5 tahap dengan sistim "On Campus dan Off Campus". Tahap 1 adalah tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi yang dilaksanakan secara "On Campus" selama 10 hari. Tahap 2 adalah tahap "Taking Ownership" atau *Breakthrough 1* yang dilaksanakan secara "Off Campus" selama 5 hari di tempat kerja asal. Tahap 3 adalah tahap Merancang Perubahan dan Membangun tim, yang dilakukan selama 15 hari. Selanjutnya adalah Tahap 4 yang merupakan *Breakthrough 2* atau *Leadership Laboratory* atau juga implementasi Proyek Perubahan yang dilakukan untuk kedua Diklatpim masing-masing selama 60 hari di tempat asal peserta Diklat. Tahap terakhir atau tahap 5 adalah tahap Evaluasi yang standarnya dilakukan secara "On Campus" di Pusdiklat atau di Ibukota Provinsi asal peserta. BPS bekerja sama dengan LAN RI pada tahun

anggaran 2018, telah melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 1 angkatan yaitu Angkatan ke-35 dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang.



Gambar 11. Kegiatan Pembelajaran Diklatpim Tingkat III

1.2.3. Diklatpim Tingkat II

Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat II bertujuan meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon II yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, PNS pemangku jabatan struktural eselon II memerlukan standar kompetensi jabatan yang meliputi kompetensi dasar (integritas, kepemimpinan, perencanaan dan pengorganisasian, kerjasama, fleksibilitas) dan sejumlah kompetensi bidang lainnya.

Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat II dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang Terakreditasi untuk Diklatpim Tingkat II, seperti Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Pusklat BPS hanya memfasilitasi biaya perjalanan peserta BPS. Pada tahun 2018, peserta Diklatpim Tingkat II dari BPS mengikuti diklat di LAN RI Jakarta sebanyak 1 orang. Diklatpim Tk. II dilaksanakan selama 405 jam pelatihan (@45 menit) atau 135 sesi, dan peserta diasramakan. Selain itu ada pula Diklatpim Tingkat I sebanyak 1 orang di LAN RI.

2. **IKU 2 : Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang Lulus dengan Kategori Baik**

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Badan Pusat Statistik adalah melalui pendidikan dan pelatihan di bidang teknis. Oleh karena itu, peran Pusdiklat BPS bersama unit kerja teknis terkait sangat dibutuhkan dalam merancang jenis diklat teknis substansi yang efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknis.

Pusdiklat BPS menyelenggarakan juga Diklat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para pejabat fungsional baik untuk pegawai BPS ataupun untuk pegawai Kementerian/Lembaga lain.

Pada diklat teknis dan fungsional, penentuan kelulusan peserta dilakukan melalui beberapa kategori yaitu kategori sangat memuaskan, baik sekali, dan baik. Unsur-unsur yang menjadi penilaian kelulusan peserta diklat teknis dan fungsional mencakup beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Penguasaan materi yang dilihat berdasarkan nilai ujian tertulis dan praktikum
2. Penyusunan kertas kerja kelompok
3. Nilai-nilai etika PNS seperti disiplin, prakarsa, dan kerja sama kelompok selama kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh nilai kelulusan peserta yang minimal berkategori baik. Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil capaian kinerja dari indikator persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus dengan kategori baik telah melampaui target yaitu sebesar 104,07 persen. Angka tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi sebesar 98,87 persen terhadap target PK 2018 sebesar 95 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang sebesar 97,50 persen, maka terjadi kenaikan sebesar 1,41 persen.

Berdasarkan capaian kinerja yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa peserta telah dapat mengetahui, memahami dan menerapkan materi yang diajarkan dengan baik. Keadaan tersebut juga tidak terlepas dari performance (penampilan, teknik mengajar, dan buku modul yang menunjang) para pengajar/widyaiswara yang telah memberikan materi dengan baik sehingga dapat diserap oleh seluruh peserta diklat.

2.1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

Salah satu upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan BPS adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional pada Pusdiklat BPS pada tahun 2018 melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan diklat yang terdiri dari Diklat Fungsional sebanyak 4 (empat) diklat dan Diklat Teknis sebanyak 5 (lima) diklat. Total Peserta yang dilatih adalah sebanyak 292 orang. Penjelasan laporan kegiatan selengkapnya adalah sebagai berikut:

2.1.1. Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli

Diklat fungsional statistisi tingkat ahli adalah diklat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pelatihan kepada PNS yang berminat untuk menduduki jabatan fungsional statistisi pada tingkat ahli. Adapun sasaran dari diklat ini adalah pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintahan yang akan menduduki dan melaksanakan tugas pada Jabatan Fungsional Statistisi Tingkat Ahli. Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana APBN BPS tahun 2018.

Pada tahun 2018 diklat ini dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali. Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober – 8 November 2018 di Pusdiklat BPS Jl. Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung, Jakarta, dengan jumlah peserta 23 orang, yang terdiri dari 12 laki-laki dan 11 perempuan. Ada sebanyak 19 peserta berasal dari BPS yang merupakan perwakilan dari BPS Pusat maupun BPS Provinsi dan sisanya 4 orang peserta non BPS yakni dari Kementerian Perdagangan, BNPB, Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kota Palangkaraya.

Pengajar diklat adalah para pejabat struktural dan fungsional pusdiklat BPS dan BPS Pusat yang berkompeten di bidang masing-masing. Berdasarkan hasil evaluasi, peserta Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli 95,65 persen dinyatakan lulus dan menerima sertifikat lulus diklat.

2.1.2. Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli (PNBP)

Selain diklat fungsional statistisi, Pusdiklat BPS pada tahun 2018 juga melaksanakan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli PNBP. Tujuan diklat tersebut sebagai bentuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPS sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer; melaksanakan tugas pokok dan fungsi pusdiklat sebagai penyelenggara diklat teknis dan fungsional selain itu; juga bertujuan untuk membentuk standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh pejabat fungsional pranata komputer.



Gambar 12. Pembukaan Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli

Sasaran diklat adalah pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintahan di luar BPS yaitu dari Kementerian Keuangan RI dan Pemerintah Kota Semarang yang akan menduduki dan melaksanakan tugas pada Jabatan Fungsional Pranata Tingkat Ahli. Kegiatan diklat ini dilaksanakan dengan mekanisme PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada tahun 2018.

Adapun pelaksanaan diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli PNBP yaitu pada tanggal 17 September – 19 Oktober 2018, yang bertempat di *Kinasih Resort*, Depok, Jawa Barat. Jumlah peserta ada sebanyak 24 orang, terdiri dari 24 orang laki-laki. Sebanyak 23 orang peserta berasal dari Kementerian Keuangan RI dan 1 orang peserta berasal dari Pemerintah Kota Semarang.

Pengajar dalam diklat ini adalah para Pejabat struktural dan fungsional Pusdiklat BPS dan BPS Pusat yang berkompeten dibidang komputer. Evaluasi nilai dilakukan dengan menjumlahkan seluruh unsur penilaian sesuai dengan bobotnya masing-masing. Hasil dari evaluasi nilai memperlihatkan rata-rata nilai seluruh peserta sebesar 79,56 dengan nilai tertinggi 80,89 dan nilai terendah 76,95 dari persyaratan nilai yang ditentukan, seluruh peserta Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli PNBP Tahun 2018 dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan sertifikat tanda kelulusan.



Gambar 13. Foto Bersama Pimpinan Pusdiklat BPS dalam rangka Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli (PNBP)

2.1.3. Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil (PNBP)

Selain diklat fungsional prakom ahli, Pusdiklat BPS pada tahun 2018 juga melaksanakan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil PNBP Angkatan I dan Angkatan II. Tujuan diklat tersebut sebagai bentuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPS sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer; melaksanakan tugas pokok dan fungsi pusdiklat sebagai penyelenggara diklat teknis dan fungsional selain itu; juga bertujuan untuk membentuk standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh pejabat fungsional pranata komputer.

Sasaran diklat adalah pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintahan di luar BPS yaitu dari Kementerian Keuangan RI yang akan menduduki dan melaksanakan tugas pada Jabatan Fungsional Pranata Tingkat Terampil. Kegiatan diklat ini dilaksanakan dengan mekanisme PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada tahun 2018.

Adapun pelaksanaan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil PNBP Angkatan I pada tanggal 28 Juni – 3 Agustus 2018 dan Angkatan II dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus – 14 September 2018 yang bertempat di *Kinasih Resort*, Depok, Jawa Barat. Jumlah peserta Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil PNBP Angkatan I dan Angkatan

II masing-masing sebanyak 27 orang yang terdiri dari 50 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Peserta Diklat berasal dari Kementerian Keuangan RI.

Evaluasi nilai dilakukan dengan menjumlahkan seluruh unsur penilaian sesuai dengan bobotnya masing-masing. Hasil dari evaluasi nilai memperlihatkan rata-rata nilai seluruh peserta Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil PNPB Angkatan I dan Angkatan II masing-masing sebesar 88,14 dan 86,66. Adapun peserta Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil PNPB Angkatan I seluruhnya dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan sertifikat tanda kelulusan. Sedangkan untuk peserta Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil PNPB Angkatan II yang dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan sertifikat tanda kelulusan sebanyak 96,30 persen.



Gambar 14. Suasana Pembelajaran Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil (PNBP) di Kinasih Resort

2.1.4. Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)

Pada Tahun 2018 Pusdiklat BPS menyelenggarakan Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Angkatan I dan Angkatan II Tahun 2018. Diklat ini bermaksud untuk meningkatkan pemahaman Pegawai BPS dalam melakukan penyusunan KTI sesuai dengan teknik-teknik yang tepat dan baik serta dapat menghindari praktek-praktek plagiarisme. Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana APBN BPS tahun 2018.

Adapun pelaksanaan Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Angkatan I pada tanggal 5 – 8 November 2018 dan Angkatan II dilaksanakan pada tanggal dengan 21 – 24 November 2018 yang bertempat di Pusdiklat BPS Jl. Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung, Jakarta. Jumlah peserta Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Angkatan I dan Angkatan II masing-masing sebanyak 40 orang dan 55 orang peserta yang terdiri dari 38 orang laki-laki dan 57 orang perempuan. Peserta Diklat berasal dari BPS Daerah, BPS Pusat dan Pusdiklat BPS. Pengajar dalam diklat ini adalah widyaiswara dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten.

Peserta Diklat Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Angkatan I dan Angkatan II yang dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan sertifikat tanda kelulusan masing-masing sebanyak 97,5 persen dan 98,21 persen.



Gambar 15. Foto Bersama Pimpinan Pusdiklat BPS dalam rangka Diklat Penulisan KTI

2.1.5. Diklat Teknis Komputer

Pusdiklat juga menyelenggarakan Diklat Teknis Komputer bagi pegawai yang merupakan penanggung jawab TIK di masing-masing BPS Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertujuan melakukan capacity building dengan memberikan kompetensi teknis bagi BPS daerah terkait infrastruktur dan layanan TIK. Adapun sasaran diklat ini adalah peserta mampu

melakukan pengolahan dan penanganan permasalahan jaringan komputer, melakukan pengelolaan dan penanganan awal terkait operasional perangkat TIK di BPS Daerah, mampu menggunakan dan melakukan pengelolaan platform kolaborasi untuk kebutuhan BPS daerah masing-masing. Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana APBN BPS tahun 2018.

Diklat ini dilaksanakan selama 4 hari efektif yaitu dari tanggal 21 sampai dengan 24 November 2018. Jumlah peserta Diklat Teknis Komputer sebanyak 40 orang peserta. Ada sebanyak 5 orang peserta yang berasal dari BPS Pusat dan 35 orang peserta merupakan wakil dari masing-masing BPS Provinsi. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap peserta dapat diketahui bahwa seluruh peserta mendapatkan sertifikat "Telah Mengikuti" diklat.



Gambar 16. Pembukaan Diklat Teknis Komputer

2.1.6. Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis

Pada Tahun 2018 Pusdiklat BPS menyelenggarakan Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis. Diklat ini dimaksudkan untuk membangun kompetensi/pengetahuan dasar tentang kearsipan bagi peserta agar mampu memahami teori/konsep dan pengetahuan dasar tentang lingkup kearsipan. Sedangkan tujuannya adalah memberikan pemahaman mengenai teori dan konsep dasar ilmu kearsipan serta menerapkan pengetahuan dasar kearsipan untuk kepentingan pekerjaan di masing-masing unit kerjanya. Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana APBN BPS tahun 2018.

Adapun pelaksanaan Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober - 3 November 2018 yang bertempat di Pusdiklat BPS Jl. Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung, Jakarta. Jumlah peserta diklat tersebut sebanyak 41 orang peserta yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 26 orang perempuan. Peserta Diklat berasal dari BPS Daerah, BPS Pusat dan Pusdiklat BPS.

Pengajar dalam diklat ini adalah widyaiswara dari Pusdiklat Arsip Nasional Republik Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap peserta dapat diketahui bahwa seluruh peserta mendapatkan sertifikat "Telah Mengikuti" diklat.



Gambar 17. Suasana Pembelajaran Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis

2.1.7. Diklat Pengenalan Statistik Dasar Angkatan I Tahun 2018

Pada Tahun 2018 Pusdiklat BPS menyelenggarakan Diklat Pengenalan Statistik Dasar Angkatan I Tahun 2018. Diklat ini dimaksudkan untuk untuk menyediakan pedoman yang dapat memberikan kemudahan dan keseragaman tata laksana statistik sektoral di tingkat pusat maupun daerah. Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana APBN BPS tahun 2018.

Adapun pelaksanaan Diklat Pengenalan Statistik Dasar Angkatan I Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 3 – 7 Desember 2018 yang bertempat di Pusdiklat BPS Jl. Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung, Jakarta. Jumlah peserta diklat tersebut sebanyak 14 orang peserta yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Peserta Diklat berasal dari

beberapa instansi di luar BPS, antara lain Pemprov. Sumatera Barat, Pemprov. Sumatera Selatan, Pemprov. Banten, Pemprov. Jawa Barat, Pemprov. Jawa Tengah, Pemprov. DI Yogyakarta, Pemprov. Jawa Timur, Pemprov. Kalimantan Selatan, dan Pemprov. Sulawesi Selatan.

Pengajar diklat adalah para pejabat struktural dan fungsional pusdiklat BPS dan BPS Pusat yang berkompeten di bidang masing-masing. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap peserta dapat diketahui bahwa seluruh peserta mendapatkan sertifikat "Telah Mengikuti" diklat.



Gambar 18. Pemberian Hadiah pada Tiga Peserta Terbaik dalam rangka Penutupan Diklat Pengenalan Statistik Dasar

3. IKU 3 : Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus

Dalam rangka Standarisasi dan Sertifikasi bagi pegawai BPS, pada tahun 2018 dilakukan kegiatan penyelenggaraan Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu dalam rangka percepatan jumlah bendahara bersertifikat diselenggarakan pula Sertifikasi Bendahara Pengeluaran.

Pada sasaran strategis pertama, untuk mengukur kinerja standarisasi dan sertifikasi diwakili oleh indikator Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus. Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil capaian kinerja dari indikator tersebut adalah sebesar 120 persen. Angka tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi sebesar 86,14 persen terhadap target

PK 2018 sebesar 70 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang sebesar 80,00 terdapat kenaikan sebesar 7,68 persen.

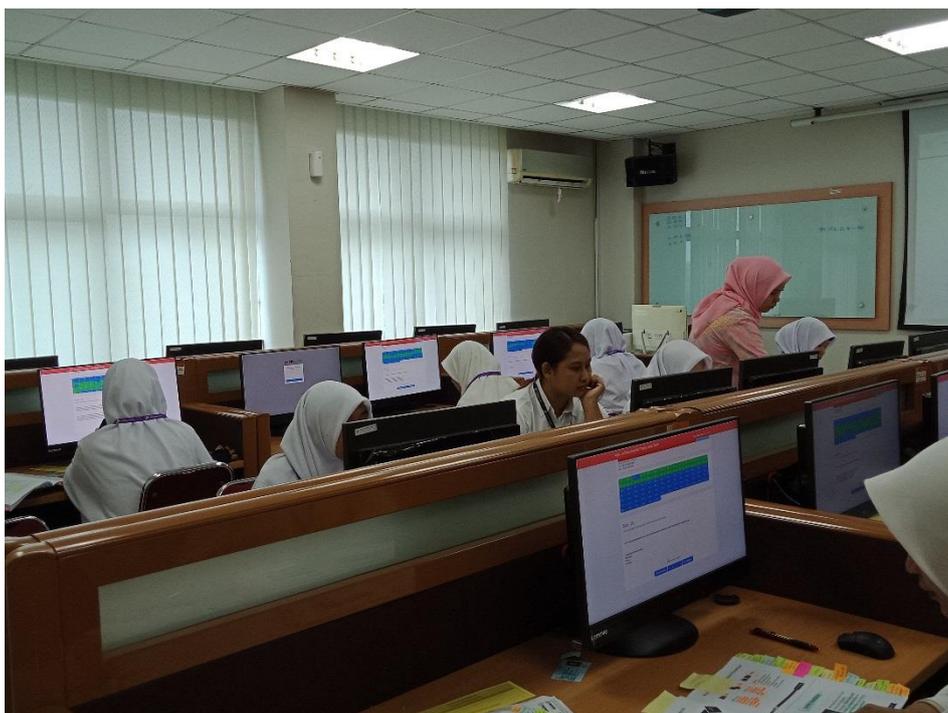
3.1. Standarisasi dan Sertifikasi

3.1.1. Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Untuk memenuhi kompetensi pegawai BPS dalam keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah, pada tahun 2018 pusdiklat menyelenggarakan Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi terdiri dari 9 angkatan yaitu angkatan XIX s.d XXVII yang merupakan hasil kerja sama dengan LKPP. Tujuan diklat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) dalam melaksanakan tugas dan jabatan sebagai pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara profesional dan beretika.

Kegiatan diklat ini diikuti oleh pegawai BPS yang akan ditunjuk sebagai panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi angkatan XIX dan XX dilaksanakan pada tanggal 5 – 10 Maret 2018. Selanjutnya, Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi angkatan XXI dilaksanakan pada tanggal 28 April – 5 Mei 2018. Untuk Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi angkatan XXII diselenggarakan pada tanggal 2 – 6 Juli 2018. Pada triwulan keempat, Pusdiklat menyelenggarakan kembali Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi angkatan XXIII – XXV pada tanggal 5 – 9 November 2018. Dilanjutkan dengan Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi angkatan XXVI – XXVII pada tanggal 26 – 30 November 2018.

Pengajar diklat berasal dari berbagai instansi pemerintah yang telah memiliki sertifikat mengajar dari LKPP. Selain kegiatan belajar-mengajar, diklat ini juga menyelenggarakan ujian sertifikasi. Ujian sertifikasi dilaksanakan secara online di laboratorium komputer pusdiklat lantai 3. Adapun berdasarkan hasil ujian sertifikasi tingkat kelulusan peserta Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi 9 angkatan pada tahun 2018 sebesar 87,74 persen atau sejumlah 272 orang dari 310 orang peserta Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi 9 angkatan.



Gambar 19. Kegiatan Ujian Sertifikasi Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3.1.2. Sertifikasi Bendahara Pengeluaran

Guna mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, diperlukan bendaharawan-bendaharawan yang kompeten. Untuk itulah, maka Pusdiklat BPS menyelenggarakan Sertifikasi Bendahara Pengeluaran Gelombang I dan Gelombang II di mana masing-masing gelombang terdiri dari dua angkatan. Sertifikasi Bendahara Pengeluaran ini diikuti oleh Pegawai BPS yang merupakan bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu yang saat ini masih menjabat.

Sertifikasi Bendahara Pengeluaran Gelombang I dilaksanakan pada tanggal 7 – 10 Oktober 2018 dan Gelombang II dilaksanakan pada tanggal 14 – 17 Oktober 2018 yang bertempat di Pusdiklat BPS Jl. Raya Jagakarsa 70, Lenteng Agung, Jakarta.

Sebelum pelaksanaan ujian sertifikasi, diadakan refreshing bagi Bendahara Pengeluaran yang disampaikan oleh Pengajar dari BPS Pusat dan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Ujian sertifikasi dilaksanakan secara online di laboratorium komputer pusdiklat lantai 3. Adapun berdasarkan hasil ujian sertifikasi tingkat kelulusan peserta Sertifikasi Bendahara Pengeluaran 4 angkatan pada tahun 2018, keseluruhan peserta dinyatakan LULUS.



Gambar 20. Suasana Pembelajaran di Kelas Diklat Bendahara Pengeluaran

4. **IKU 4 : Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat**

Penyelenggaraan diklat dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerjasama antara penyelenggara, peserta diklat, dan pengajar/widyaiswara. Dalam upaya pelaksanaan diklat yang lebih baik dan peningkatan mutu penyelenggaraan diklat, perlu diketahui seberapa jauh kemampuan para peserta dalam menyerap materi, kemampuan dan kualitas tenaga pengajar/widyaiswara terhadap materi yang diberikan di kelas, serta pelayanan penyelenggara dan sarana prasarana yang memadai. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pelayanan penyelenggara terhadap kegiatan diklat yang diadakan oleh Pusdiklat BPS, peserta diminta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan melalui saran-saran dan komentar. Penyelenggaraan diklat yang dievaluasi meliputi fasilitas akomodasi, konsumsi, dan penyelenggara. Melalui evaluasi tersebut dapat diketahui kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat.

Kepuasan peserta diklat merupakan salah satu yang dijadikan indikator capaian kinerja untuk memenuhi sasaran terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan. Tinggi rendahnya capaian kinerja yang diperoleh menjadi salah satu acuan bagi Pusdiklat BPS agar dapat meningkatkan mutu pelayanan diklat ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Untuk mengetahui capaian kinerja dari indikator tersebut dapat dilihat melalui besarnya realisasi

terhadap target PK 2018. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada indikator kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat adalah sebesar 96,76 persen. Angka tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 89,51 persen dibandingkan target PK 2018 sebesar 92,50 persen. Target PK pada indikator kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat merupakan rata-rata antara target PK pada Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan dan Bidang Diklat Teknis dan Fungsional. Tingkat capaian yang diperoleh sedikit lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan namun hamper mencapai 100 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang sebesar 89,45 persen, maka terjadi sedikit kenaikan sebesar 0,07 persen.

Angka capaian 96,76 persen sudah relatif menunjukan ke arah yang lebih baik. Perbaikan terjadi berkat kerjasama dan komitmen para penyelenggara untuk selalu memperbaiki layanan berdasarkan masukan dari peserta. Peserta memberi masukan baik melalui angket pada periode tertentu maupun melalui masukan sewaktu-waktu terkait penyelenggaraan diklat.

Di sisi lain, evaluasi penyelenggaraan dilakukan terhadap widyaiswara/pengajar yang terlibat langsung terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan pengisian angket yang berisi penilaian peserta diklat terhadap pengajar diperoleh kesimpulan bahwa widyaiswara/pengajar dapat menyampaikan materi dengan baik, dengan nilai rata-rata 90,65.

Secara umum proses pembelajaran sudah ke arah lebih baik, terutama pada diklat prajabatan dan diklatpim. Dengan adanya pelaksanaan diklat melalui pola baru, peserta merasa lebih menyukai pola baru tersebut karena materi yang dipelajari dapat diaplikasikan langsung di tempat tugas masing-masing melalui aktualisasi bagi diklat prajabatan dan proyek perubahan bagi diklatpim.

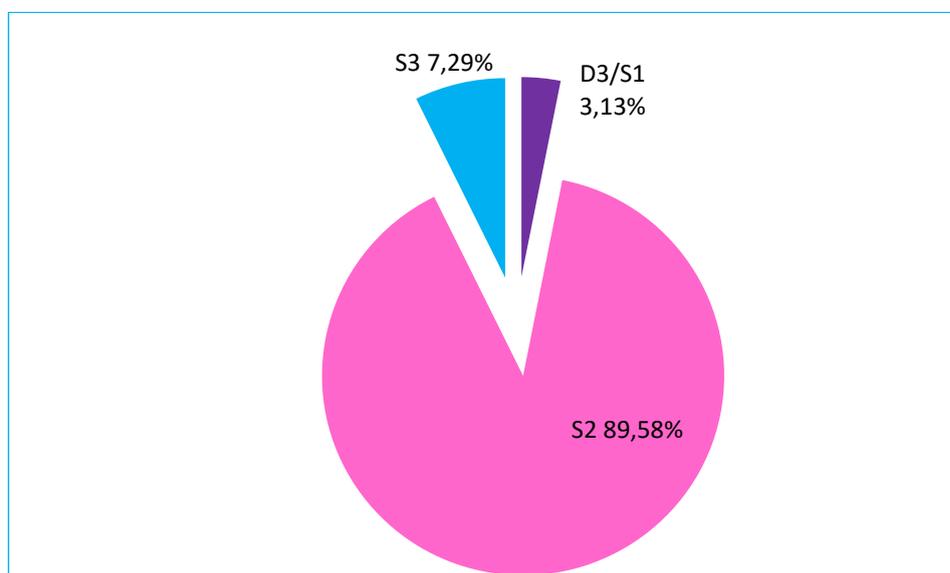
Untuk menunjang kenyamanan peserta dalam mengikuti diklat, telah dilakukan pembenahan fasilitas-fasilitas seperti kamar asrama, kelas, laboratorium, dan fasilitas lainnya melalui pemeliharaan bangunan dan gedung. Untuk meningkatkan sarana diklat di bidang kesehatan dan hiburan, Pusdiklat BPS menyediakan fasilitas alat-alat fitness, kursi pijat elektrik, dan alat musik karaoke yang berada di ruang khusus di gedung basement. Sarana tersebut diharapkan dapat menambah fasilitas peserta sebagai penunjang kesehatan dan hiburan di sela-sela kesibukan mengikuti diklat. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam

meningkatkan sarana prasarana diklat tersebut juga merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat.

5. IKU 5 : Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan

PNS yang ingin meningkatkan kemampuan dan keahliannya dalam rangka mendukung tugas sebagai aparatur negara, dapat mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri melalui jalur Izin Belajar (IB). Pusdiklat BPS sebagai pengelola IB melakukan kegiatan pelaksanaan pemberian IB dan mengadministrasikannya bagi pegawai BPS yang ingin melanjutkan sekolah melalui jalur IB. Seluruh IB program S2 dan S3 diproses oleh Pusdiklat dengan mendapat rekomendasi/ persetujuan dari Sekretaris Utama (Sestama). Sementara itu untuk pegawai yang akan melanjutkan ke jenjang S1, bagi pegawai BPS Pusat surat IB-nya dibuat oleh Pusdiklat sedangkan bagi pegawai BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dibuat oleh Kepala BPS Provinsi yang ditembuskan ke Pusdiklat dan Biro Kepegawaian.

Persentase penyelesaian Surat Izin Belajar yang dilakukan Pusdiklat BPS pada jenjang pendidikan D3/S1, S2 dan S3 dapat dilihat pada Gambar 21. Surat Izin Belajar yang telah diterbitkan oleh Pusdiklat BPS sebagian besar pada jenjang pendidikan S2 sebesar 89,58 persen. Sementara itu, untuk S3 sebesar 7,29 persen dan D3/S1 sebesar 3,13 persen.



Gambar 21. Persentase Penyelesaian Surat Izin Belajar oleh Pusdiklat BPS pada Jenjang Pendidikan S1, S2, dan S3, Tahun 2018

Penyelesaian surat izin belajar menjadi salah satu indikator capaian kinerja dalam rangka terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan. Pada Tabel 7 ditunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja untuk surat izin belajar yang diselesaikan pada tahun 2018 sesuai dengan target PK 2018 yaitu 100 persen.

Capaian kinerja yang sesuai harapan tersebut menunjukkan kinerja Pusdiklat BPS yang cukup berhasil dalam mewujudkan layanan diklat sekaligus untuk peningkatan dan pengembangan SDM pegawai BPS yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya.

6. IKU 6 : Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS

Selain mengelola izin belajar, Pusdiklat BPS mempunyai tugas menyelenggarakan program Tugas Belajar (TB). Program tersebut dilakukan Pusdiklat BPS dengan kegiatan mengirim dan mengelola TB bagi pegawai BPS baik ke dalam maupun ke luar negeri. Program TB yang dimaksud di sini mencakup untuk program pendidikan gelar S2 dan S3, sehingga tidak ada untuk program pendidikan non gelar (short course dan post doctoral). Dari sisi pembiayaan, program TB yang diselenggarakan oleh Pusdiklat terdiri dari:

1. Beasiswa APBN BPS

Program ini adalah kerjasama rintisan gelar S2 maupun S3 antara BPS dengan perguruan tinggi yang ada di dalam negeri seperti UI, ITB, IPB, UGM, UNPAD, dan ITS.

2. Beasiswa APBN Non BPS

Program ini berupa tawaran beasiswa dari Bappenas atau Kementerian/Lembaga lain baik untuk program S2 dalam negeri, luar negeri, maupun Double Degree dan S3.

3. Beasiswa Non APBN

Penyedia utama beasiswa non APBN adalah STUNED untuk studi di Belanda dan AAS untuk studi di Australia. Selain itu terdapat pula beberapa negara sponsor beasiswa seperti Jepang, Jerman, Belanda, dan Swiss namun tidak ditawarkan setiap tahun.

4. Individu pegawai juga dapat mencari sendiri sponsor beasiswa. Setelah mendapat izin dari atasannya (Eselon II), maka dapat diajukan ke Pusdiklat untuk mendapatkan status TB dengan menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar (SPTB) dan menerima Surat Keputusan Tugas Belajar (SKTB) dari Biro Kepegawaian.

Pelaksanaan program TB Rintisan Gelar (APBN) didahului adanya Memorandum of Understanding (MOU) antara BPS dengan Universitas/ Perguruan Tinggi (Univ/PT), yang dilanjutkan dengan pembuatan Perjanjian Kerjasama setiap akan mengirim calon mahasiswa

baru. Pusdiklat BPS juga menyusun dan mengajukan rencana biaya pendidikan, tunjangan hidup, buku, dan riset peserta Tugas Belajar APBN dan merencanakan jumlah pegawai yang akan ditugasbelajarkan.

Penyelenggaraan program beasiswa APBN BPS merupakan salah satu wujud layanan Pusdiklat BPS untuk mengakomodir pegawai BPS melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari program ini diharapkan dapat menyiapkan calon-calon pimpinan BPS yang akan menduduki jabatan struktural BPS baik di pusat maupun daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pejabat fungsional seperti fungsional pranata komputer, statistisi, peneliti, widyaiswara, dosen, dan sebagainya.



Gambar 22. Peserta TB APBN BPS S2 IPB Tahun 2018



**Gambar 23. Acara Pembekalan Kepala Pusdiklat BPS kepada Peserta TB S2 UI
Tahun 2018**



**Gambar 24. Acara Pembekalan Kepala Pusdiklat kepada Peserta TB S2 Unair
Tahun 2018**



Gambar 25. Acara Wisuda Peserta TB S2 UGM Magister Ekonomi Pembangunan (MEP)



Gambar 26. Acara Yudisium Peserta TB S3 UI Ilmu Ekonomi

Tabel 7. Jumlah Pegawai BPS yang memperoleh Beasiswa S2 dan S3 Tahun 2018

No	Program Beasiswa	APBN BPS	Sponsor			Jumlah Tugas Belajar
			Dalam Negeri	Luar Negeri	Double Degree	
1	S2	110	47	7	13	177
2	S3	7	-	2	-	9
Jumlah		117	47	9	13	186

Jumlah pegawai yang mengikuti Tugas Belajar yang dibiayai APBN BPS pada tahun 2018 adalah sebanyak 117 orang (Tabel 7). Mereka tersebar di beberapa perguruan tinggi yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB) program studi Informatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) program studi Statistika, Universitas Padjadjaran (Unpad) program studi Statistika, Universitas Indonesia (UI) program studi ketenagakerjaan, dan Institut Pertanian Bogor (IPB) program studi Statistika. Selain dari APBN BPS terdapat pegawai yang memperoleh beasiswa dari Non BPS baik dalam negeri maupun luar negeri sebanyak 69 orang.

Pada tahun 2018 jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS ditargetkan sebanyak 120 orang, namun realisasi sebanyak 118 orang sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 98,33 persen. Hal tersebut disebabkan karena terdapat 2 orang calon tugas belajar yang tidak lulus pada saat mengikuti tes akademik di universitas. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebanyak 121 orang terdapat sedikit penurunan sebesar 2,48 persen. Penurunan jumlah peserta TB dibandingkan tahun 2017 dikarenakan berkurangnya pengusulan calon peserta tugas belajar dari Eselon II masing-masing baik BPS Provinsi maupun Pusat.

Capaian kinerja yang diperoleh pada indikator di atas menunjukkan bahwa peserta TB pada tahun 2018 tidak ada yang mengundurkan diri atau drop out sehingga perkuliahan berjalan lancar dan sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya pelayanan Pusdiklat BPS yang berkinerja baik dalam menangani semua permasalahan penyelenggaraan TB baik dalam hal penanganan pemberian uang saku/biaya hidup, uang

buku, uang riset, maupun biaya pendidikan. Selain itu pula kelancaran dalam hal penanganan peserta yang akan mengikuti ujian tesis baik penyediaan penguji maupun operasional lainnya.

SASARAN 2 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA YANG TRANSPARAN

Kelancaran dan keberhasilan tugas dan fungsi pokok Pusdiklat BPS dalam mewujudkan layanan pendidikan dan pelatihan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja yang transparan. Akuntabilitas kinerja yang transparan sangat diperlukan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan merupakan sasaran kedua dalam Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS tahun 2018. Sasaran tersebut dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan Pusdiklat BPS dalam mengemban tugas di bidang pendidikan dan pelatihan.

Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang Transparan Tahun 2018

IKU	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)	Realisasi 2017	Perubahan terhadap realisasi 2017
					(%) $((3)/(5)*100)-100$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	70	70,47	100,67	70,27	0,28
Rata rata Capaian Kinerja			100,67		

7. IKU : Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Salah satu hal yang menjadi inti dari reformasi birokrasi adalah akuntabilitas instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang akuntabel semakin penting keberadaannya mengingat semakin tingginya ekspektasi dan tuntutan masyarakat atas pelayanan pemerintah. Pusdiklat BPS sebagai salah satu unsur dari instansi pemerintah juga harus meningkatkan akuntabilitasnya. Akuntabilitas dimaksud tidak hanya dari sisi keuangan saja, meskipun dari

sisi tersebut mutlak diperlukan melainkan juga dari sisi kinerja. Dengan penguatan akuntabilitas ini, diharapkan akan memberi efek peningkatan kinerja yang pada gilirannya akan menghasilkan pelayanan prima baik kepada pegawai BPS maupun instansi lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi yang dilakukan dalam rangka penilaian SAKIP ditujukan untuk menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusdiklat BPS dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Dalam evaluasi SAKIP komponen yang dinilai terdiri atas :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Masing-masing komponen tersebut terbagi lagi ke dalam evaluasi sub komponen:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Perencanaan Strategis
 - 1). Pemenuhan Renstra
 - 2). Kualitas Renstra
 - 3). Implementasi Renstra
 - b. Perencanaan Kinerja Tahunan
 - 1). Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan
 - 2). Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan
 - 3). Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan
2. Pengukuran Kinerja

- a. Pemenuhan Pengukuran
- b. Kualitas Pengukuran
- c. Implementasi Pengukuran
- 3. Pelaporan Kinerja
 - a. Pemenuhan Pelaporan
 - b. Kualitas Informasi Kinerja
 - c. Pemanfaatan Informasi Kinerja
- 4. Evaluasi Kinerja
 - a. Pemenuhan Evaluasi
 - b. Kualitas Evaluasi
 - c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi
- 5. Pencapaian Sasaran/Kinerja
 - a. Kinerja Yang Dilaporkan (Output)
 - b. Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome)

Sebagai acuan dalam pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan adalah melalui indikator hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Indikator tersebut dapat menggambarkan bahwa semakin tinggi realisasi penilaian SAKIP menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada tahun 2018 adalah sebesar 70,47 poin sedangkan target PK 2018 adalah sebesar 70 poin. Berdasarkan nilai tersebut diperoleh capaian kinerja sebesar 100,67 persen yang artinya bahwa tingkat pencapaian kinerja yang diperoleh telah melebihi dari target yang diharapkan. Angka ini sejalan dengan upaya Pusdiklat BPS dari tahun ke tahun untuk selalu memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini terbukti dari adanya peningkatan poin sebesar 0,28 persen dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 70,27 poin.

3.3. Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Terhadap Target Renstra 2018 dan 2019

Rencana Strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Rencana Strategis merupakan proses perencanaan jangka menengah (lima tahun) yang formal untuk mencapai tujuan organisasi.

Untuk mengetahui keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya pengukuran terhadap indikator-indikator yang mewakili pencapaian kedua hal tersebut.

Berdasarkan Tabel 9, jika dibandingkan target Renstra tahun 2018 dan 2019, maka capaian indikator dari tujuan "Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima" belum mencapai hasil yang maksimal, yaitu diperoleh capaian terhadap target Renstra 2018 sebesar 94,22 persen dan 2019 sebesar 93,24 persen. Untuk indikator tersebut tidak perlu dilakukan penurunan target melainkan penggalan lebih dalam pada proses perencanaan dan upaya yang lebih besar agar kinerja indikator tersebut semakin meningkat.

Indikator pertama yang terdapat pada Sasaran Strategis pertama tercatat bahwa realisasi persentase peserta diklat prajabatan dan kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan pada tahun 2018 sebesar 97 persen jauh lebih tinggi dibandingkan target Renstra tahun 2018 dan 2019 yaitu masing-masing sebesar 93 persen dan 94 persen. Dengan capaian diatas 100 persen diperlukan penajaman target agar pengukuran keberhasilan Pusdiklat BPS terhadap indikator tersebut lebih menggambarkan.

Begitu pula pada capaian indikator kedua yaitu persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus dengan kategori baik telah berhasil melebihi target, yaitu dengan realisasi sebesar 98,87 persen terhadap target renstra 2018 yang sebesar 93 persen dan target Renstra 2019 sebesar 94 persen. Untuk itu perlu dilakukan pula penajaman target agar pengukuran keberhasilan Pusdiklat BPS terhadap indikator tersebut lebih menggambarkan.

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2018 dengan Target Renstra Tahun 2018 dan 2019

Tujuan/Sasaran/IKU	Target Renstra		Realisasi 2018	Capaian terhadap Target (%)	
	2018	2019		2018	2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T.	Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima				
Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	95	96	89,51	94,22	93,24

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SS 1.	Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima					
	1. Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	93	94	97	104,30	103,19
	2. Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	93	94	98,87	106,31	105,18
	3. Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus	70	70	86,14	120,00	120,00
	4. Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	95	96	89,51	94,22	93,24
	5. Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan	100	100	100	100,00	100,00
	6. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS	320	324	118	36,88	36,42
SS 2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang Transparan					
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	74	75	70,47	95,23	93,96

Realisasi pada indikator ketiga yaitu persentase peserta diklat pengadaan barang dan jasa yang lulus adalah sebesar 86,14 persen, jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan target Renstra baik tahun 2018 maupun 2019 yang masing-masing sebesar 70 persen. Dengan capaian terhadap target sebesar 120 persen, diperlukan penajaman target agar pengukuran keberhasilan Pusdiklat BPS terhadap indikator tersebut lebih tergambar.

Capaian pada indikator keempat yaitu persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat belum dapat dikatakan berhasil dengan realisasi sebesar 89,51

persen. Angka tersebut kurang dari target Renstra baik pada tahun 2018 maupun tahun 2019 yaitu masing-masing sebesar 95 persen dan 96 persen. Sejalan dengan itu, untuk indikator tersebut perlu digali informasi lebih dalam lagi apakah perlu melakukan revisi terhadap target indikator tersebut. Selain itu perlu upaya dan kerja keras dari seluruh pihak terkait agar di masa mendatang diperoleh capaian kinerja yang lebih tinggi mengingat indikator kepuasan peserta diklat dapat dikatakan sebagai tolok ukur keberhasilan Pusdiklat BPS dalam menyelenggarakan kegiatan diklat.

Pada indikator kelima dari SS 1. yaitu persentase surat izin belajar yang diselesaikan diperoleh capaian kinerja yang telah sesuai dengan Renstra baik tahun 2018 maupun tahun 2019. Di sisi lain, capaian indikator keenam sangat jauh dari target Renstra tahun 2018 dan 2019. Tercatat jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS pada tahun 2018 sebesar 118 orang sedangkan target Renstra tahun 2018 dan 2019 adalah sebesar 320 orang dan 324 orang. Untuk itu perlu digali informasi lebih dalam lagi apakah perlu melakukan revisi terhadap target indikator tersebut. Selain itu, perlu penggalian lebih dalam lagi pada proses perencanaan kegiatan tahun 2019 agar target yang ditentukan tidak terlalu tinggi.

3.4. Kegiatan Prioritas Pusdiklat BPS Tahun 2018

Salah satu kegiatan prioritas yang diselenggarakan Pusdiklat BPS pada tahun 2018 adalah Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III Reguler. Diklat tersebut dilaksanakan pada awal tahun 2017 yang diperuntukkan bagi calon pegawai lulusan STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Statistik) tahun 2016. Penempatan skala prioritas pada kegiatan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III Reguler dilakukan untuk mengantisipasi terkait peraturan pemerintah, yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang masa percobaan Calon PNS yang hanya berlaku 1 (satu) tahun. Lama diklat yang cukup panjang selama 113 hari berdampak pada penyelesaian beberapa angkatan Latsar yang seminar evaluasinya dilaksanakan pada tahun 2019.

Pada tahun ini, kegiatan diklat teknis yang masih menjadi prioritas adalah penyelenggaraan Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan ini untuk memenuhi kompetensi pegawai BPS dalam keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya kegiatan pengadaan barang dan jasa di BPS. Untuk menampung banyaknya peserta kegiatan tersebut, kegiatan Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diadakan sebanyak 9 (sembilan) kelas.

3.5. Upaya Efisiensi

Upaya efisiensi yang telah dilakukan Pusdiklat BPS selama tahun 2018 adalah:

1. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Utama Nomor B-074/BPS/2110/1/2018 tanggal 22 Januari 2018 perihal Rencana Efisiensi T.A. 2018, Pusdiklat BPS melakukan penghematan terhadap pagu sebesar Rp 328,81 juta sehingga total pagu yang pada awal tahun anggaran sebesar Rp 64.698,98 juta menjadi Rp 64.370,17 juta yang dapat digunakan hingga akhir tahun anggaran.
2. Dalam rangka kegiatan penyelenggaraan diklat, Pusdiklat BPS berupaya melakukan efisiensi penggunaan anggaran untuk menghasilkan output yang maksimal. Salah satu efisiensi yang dilakukan adalah pelaksanaan seminar evaluasi pada diklat prajabatan dan kepemimpinan. Untuk menghemat anggaran perjalanan maka lokasi seminar diadakan di daerah masing-masing peserta (setiap daerah terdiri dari maksimal 10 peserta diklat), kecuali peserta dari BPS Pusat dan sekitarnya diadakan di Pusdiklat BPS. Optimalisasi anggaran digunakan untuk kegiatan diklat lain terutama diklat teknis yang sangat diperlukan dalam rangka menunjang kinerja dan kualitas pegawai BPS.
3. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 dari total pagu anggaran sebanyak Rp 64.370,17 juta direalisasikan anggaran sebanyak Rp 58.762,63 juta atau sekitar 91,29 persen. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 96,76 persen dan capaian kinerja sasaran sebesar 103,61 persen, dapat dikatakan Pusdiklat BPS telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran meskipun belum maksimal.

3.6. Realisasi Anggaran Tahun 2018

Pagu Anggaran Menurut Sasaran Strategis

Dalam rangka menunjang pencapaian kinerja dari sasaran strategis yang tertuang pada masing-masing indikator, diperlukan anggaran yang memadai sehingga tujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima dapat tercapai. Pada pagu anggaran Pusdiklat BPS, output maupun komponen/subkomponen belum sepenuhnya dapat menggambarkan secara rinci sasaran tersebut. Namun, beberapa subkomponen anggaran dapat sedikit menggambarkan indikator-indikator yang ada pada sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima seperti pada Tabel 10.

**Tabel 10. Pagu Anggaran Menurut Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1:
Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima
Tahun 2018**

IKU	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)	Pagu Anggaran 2018 (juta rupiah)	Persentase anggaran terhadap Output 966
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Output 966. Layanan Pendidikan dan Pelatihan				46.782,84	100,00
Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	92,00	97,00	105,43	22.096,45	47,23
Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	95,00	98,87	104,07	3.629,38	7,76
Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus	70,00	86,14	120,00	2.214,88	6,04
Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	92,50	89,51	96,76	-	-
Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	-	-
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS	120	118	98,33	16.990,31	38,97

Untuk mewujudkan capaian kinerja pada Indikator Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan, didukung dengan anggaran yang relatif cukup besar yaitu sebanyak 22.096,45 juta rupiah atau sebesar 47,23 persen dari

seluruh anggaran pada output Layanan Pendidikan dan Pelatihan. Dengan dana yang cukup besar diharapkan dapat memenuhi kegiatan pengembangan kompetensi pegawai baik Pelatihan Dasar CPNS Golongan III maupun diklat kepemimpinan. Selain itu, anggaran yang cukup besar juga disediakan untuk menunjang pengembangan pegawai BPS melalui indikator sasaran yaitu Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS. Anggaran yang disediakan tersebut sebanyak 16.990,31 juta rupiah atau 38,97 persen.

Sementara itu untuk memenuhi pencapaian kinerja peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus dengan kategori baik, ditunjang dengan anggaran sebanyak 3.629,38 juta rupiah atau sebesar 7,76. Dan untuk indikator Persentase Peserta Diklat Barang dan Jasa yang Lulus didukung dengan anggaran sebanyak 1.903,57 juta rupiah atau 6,04 persen.

Pagu Anggaran Menurut Program dan Sumber Dana

Selain dari sisi SDM, keberhasilan pencapaian kinerja sangat didukung oleh anggaran yang tersedia di Pusdiklat BPS. Dukungan dana tersebut diwujudkan melalui 2 (dua) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya (DMPTTL), dan (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA). Keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab Kepala Pusdiklat BPS beserta jajarannya atas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan.

Dari sisi anggaran, untuk mencapai kinerja yang diharapkan pada tahun 2018 dialokasikan pagu anggaran sebanyak Rp 64.370,17 juta. Pagu anggaran tersebut terdiri dari Program DMPTTL sebesar Rp 63.468,83 juta yang terdiri dari Rp 60.095,91 juta berasal dari rupiah murni dan Rp 3.372,92 juta berasal dari PNBP, serta Program PSPA sebanyak Rp 901,34 juta. Rincian Pagu anggaran Pusdiklat BPS tahun 2018 menurut program dan sumber dana dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Pagu Anggaran Pusdiklat BPS Menurut Program dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2018 (Juta rupiah)

Program / Sumber Dana	Rupiah Murni	PNBP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
01 DMPTTL	60.095,91	3.372,92	63.468,83
02 PSPA	901,34	-	901,34
Total	60.997,25	3.372,92	64.370,17

Dari Tabel 11 dapat dilihat pula bahwa Program DMPTTL memberikan kontribusi terbesar terhadap pagu anggaran Pusdiklat BPS yaitu sebesar 98,60 persen dan hanya sebagian kecil untuk Program PSPA yaitu sebesar 1,40 persen.

Pagu dan Realisasi Anggaran 2018

Dari total pagu anggaran sebanyak Rp 64.370,17 juta direalisasikan anggaran sebanyak Rp 58.762,63 juta atau sekitar 91,29 persen seperti yang dapat dilihat pada Tabel 12.

1. Program DMPTTL

Pada Program DMPTTL terdapat 2 (dua) output yaitu Layanan Pendidikan dan Pelatihan serta Layanan Perkantoran.

1a. Layanan Pendidikan dan Pelatihan

Untuk output Layanan Pendidikan dan Pelatihan direalisasikan anggaran sebesar 90,77 persen yaitu Rp 42.464,32 juta dari pagu anggaran Rp 46.782,84 juta. Pada output tersebut terdapat 4 (empat) komponen yang masing-masing telah direalisasikan anggarannya. Komponen Pendidikan dan Latihan Aparatur dan Rintisan Pendidikan Gelar direalisasikan anggaran sebesar 98,61 persen. Kontribusi terbesar pada komponen ini adalah sub komponen Rintisan Gelar yaitu sebesar 99,17 persen. Pada Rintisan Gelar telah direalisasikan anggaran untuk keperluan peserta tugas belajar berupa uang bantuan biaya hidup, uang buku dan referensi, bantuan riset/penelitian/seminar, dan biaya pendidikan ke masing-masing perguruan tinggi. Selain itu, terdapat pula biaya perjalanan pemanggilan/pemulangan peserta tugas belajar dan perjalanan dalam rangka kerjasama perguruan tinggi.

Pada komponen Pendidikan dan Latihan Prajabatan dan Kepemimpinan direalisasikan anggaran sebesar 86,96 persen. Anggaran terbesar terdapat pada subkomponen Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III yang terdiri dari 439 peserta diklat (12 angkatan) dan telah terealisasi sebesar 93,00 persen. Pada komponen tersebut terdapat subkomponen Jasa Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan (PNBP) dengan pagu anggaran Rp. 1.787,94 juta namun realisasinya 0 persen. Hal ini terjadi karena keterbatasan kelas dan kamar asrama serta jadwal diklat yang padat sehingga tidak dapat menerima peserta dari instansi luar.

Sementara itu, pada komponen Pendidikan dan Latihan Teknis terdapat beberapa subkomponen kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BPS. Daya serapnya terendah dibandingkan komponen lainnya yaitu terealisasi sebesar 77,05 persen. Pada

komponen tersebut, karena beberapa alasan teknis untuk Diklat Teknis Kenercaan tidak dapat diselenggarakan sehingga anggarannya digunakan untuk penyelenggaraan Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan Diklat Pengenalan Statistik Dasar. Sedangkan untuk komponen Standardisasi dan Sertifikasi menyerap anggaran sebesar 87,62 persen yang berasal dari sub komponen Diklat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa dan Sertifikasi Bendahara Pengeluaran.

1b. Layanan Perkantoran

Penyerapan anggaran pada output Layanan Perkantoran adalah sebesar 92,68 persen yaitu Rp 15.464,80 juta dari pagu anggaran Rp 16.685,99 juta, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang. Belanja pegawai berupa komponen Gaji dan Tunjangan dengan realisasi sebesar 97,29 persen.

Sementara itu, untuk belanja barang terdapat pada komponen Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dengan realisasi sebesar 82,83 persen.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (PSPA)

Sementara itu, pada Program PSPA yaitu output Layanan Internal direalisasikan sebesar 92,48 persen, yaitu Rp 833,52 juta dari pagu anggaran Rp 901,34 juta berupa belanja modal terdiri dari belanja gedung dan bangunan dan pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi.

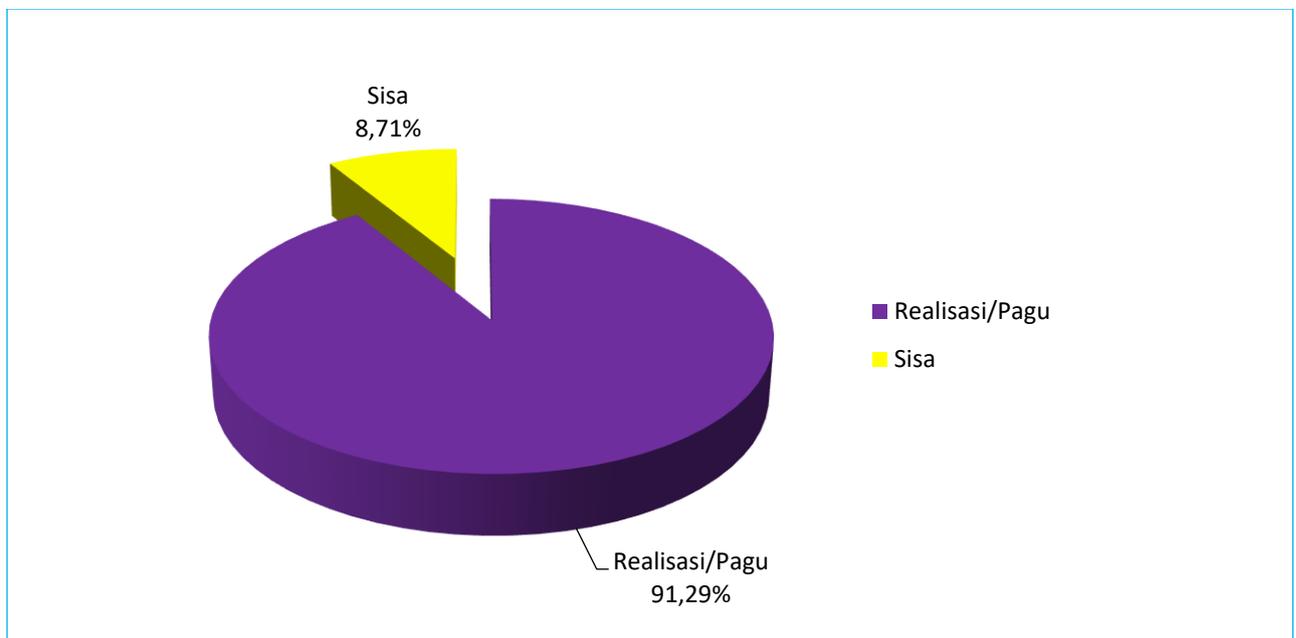
Tabel 12. Realisasi Anggaran Pusdiklat BPS Tahun Anggaran 2018 (Juta Rupiah)

Kode	Rincian	Pagu Anggaran 2018 (Juta Rupiah)	Realisasi Anggaran 2018 (Juta Rupiah)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Total Pagu Anggaran (DMPTTL + PSPA)	64.370,17	58.762,63	91,29
2887	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara	63.468,83	57.929,11	91,27
966	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	46.782,84	42.464,32	90,77

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
601	Pendidikan dan Latihan Aparatur dan Rintisan Gelar	18.229,59	17.976,31	98,61
A	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara	1.239,28	1.126,87	90,93
B	Rintisan Gelar	16.990,31	16.849,44	99,17
631	Pendidikan dan Latihan Prajabatan dan Kepemimpinan	22.096,45	19.214,20	86,96
A	Latsar CPNS Gol III	11.355,87	10.560,86	93,00
B	Diklatpim IV	7.623,72	7.337,60	96,25
C	Diklatpim III	1.282,89	1.275,75	99,44
D	Diklatpim II	46,03	39,99	86,88
E	PNBP Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan	1.787,94	0,00	0,00
661	Pendidikan dan Latihan Teknis dan Fungsional	3.629,38	2.796,40	77,05
A	Diklat Teknis Keneracaan	0,00	0,00	-
B	Diklat Teknis Substansi Komputer	271,31	227,61	83,89
C	Diklat Fungs. Statistisi Ahli	335,88	320,43	95,40
G	PNBP Diklat Teknis dan Fungsional	551,78	0,00	0,00
H	Diklat/Workshop/Seminar Pengembangan SDM	536,55	520,87	97,08
I	Diklat teknis Pengelolaan Arsip Dinamis	260,24	245,47	94,33
J	Diklat Prakom Trampil I (PNBP)	351,81	319,09	90,70
K	Diklat Prakom Trampil II (PNBP)	363,49	335,01	92,17
L	Diklat Prakom Ahli (PNBP)	317,91	209,23	65,82
M	Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah	540,68	533,92	98,75
N	Diklat Pengenalan Statistik Dasar	99,75	84,76	84,97
674	Standardisasi dan Sertifikasi	2.827,42	2.477,41	87,62
	Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2.214,88	1.903,57	85,94
	Sertifikasi Bendahara Pengeluaran	612,54	573,85	93,68

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
994	Layanan Perkantoran	16.685,99	15.464,80	92,68
	Gaji dan Tunjangan	11.368,38	11.060,33	97,29
	Oprasional dan Pemeliharaan Kantor	5.317,61	4.404,47	82,83
2890	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Negara			
951	Layanan Internal (Overhead)	901,34	833,52	92,48

Sebagai gambaran realisasi dan sisa anggaran Pusdiklat BPS tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 27.



Gambar 27. Grafik Penyerapan Anggaran Pusdiklat BPS Tahun 2018

BAB IV

PENUTUP



4.1. Tinjauan Umum

Seiring dengan tuntutan BPS untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas serta pelayanan yang prima kepada pengguna data, Pusdiklat BPS juga dihadapi tantangan untuk menyediakan SDM yang lebih berkualitas melalui peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan BPS.

Untuk memenuhi tantangan yang dihadapi dan mempermudah pencapaiannya, Pusdiklat BPS menyusun satu tujuan capaian kinerja, dua sasaran strategis dan tujuh indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2018. Tujuan capaian kinerja yang telah dicapai Pusdiklat BPS pada tahun 2018 adalah terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima. Sedangkan sasaran strategis yang telah dicapai adalah (i) meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima dan (ii) meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan.

Capaian kinerja tujuan Pusdiklat BPS pada tahun 2018 adalah sebesar 96,76 persen. Dengan angka diatas 90 persen, hal ini menggambarkan bahwa secara umum kinerja Pusdiklat BPS tahun 2018 cukup memuaskan dengan mewujudkan layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima. Namun, diperlukan kerja keras lagi dari semua pihak agar capaian kinerja dapat mencapai sesuai target bahkan melebihi dari target yang diharapkan.

Di sisi lain, jika dilihat menurut indikator sasaran, yaitu "Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima" serta "Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan", rata-rata capaian kinerja yang diperoleh telah melebihi target atau diatas 100 persen yaitu mencapai 103,61 persen.

Sejalan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis yang telah melebihi target, dapat dilihat bahwa dari sisi peserta diklat hasilnya sangat memuaskan dimana capaiannya telah melebihi target. Hal ini terbukti dari angka capaian kinerja pada indikator "Persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan" yaitu sebesar 105,43 persen, "Persentase peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik" sebesar 104,07 persen, dan "Persentase peserta Diklat Pengadaan Barang/Jasa yang Lulus" sebesar 120 persen.

Tingkat capaian kinerja yang telah dicapai mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pusdiklat BPS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi visi dan misi Pusdiklat BPS.

Disisi lain masih terdapat beberapa kekurangan terkait tidak tercapainya target beberapa IKU. Untuk mencapai target yang diinginkan tentunya hal ini perlu tindak lanjut sehingga diharapkan pencapaian pada tahun depan dapat ditingkatkan. Peningkatan bukan saja berupa bertambahnya realisasi kinerja namun dapat berupa penajaman indikator maupun target kinerja sehingga pengukuran terhadap tujuan dan sasaran strategis meningkat baik secara kualitas maupun relevansinya.

4.2. Tindak Lanjut

Pada tahun 2018, terdapat dua indikator yang capaian kerjanya kurang dari 100 persen. Meskipun kurang dari target namun kedua indikator tersebut masih dapat dikatakan cukup memuaskan karena capaian kerjanya sudah lebih dari 90 persen. Indikator Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat dengan capaian sebesar 96,76 persen. Namun hal ini perlu tetap menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti agar tahun-tahun berikutnya dapat menghasilkan kinerja yang lebih memuaskan. Salah satu faktor adalah dengan meningkatkan realisasi capaian kinerja indikator tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak penyelenggara dalam hal ini pimpinan/struktural, widyaiswara/pengajar, dan seluruh pegawai Pusdiklat BPS untuk meningkatkan kinerja masing-masing sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat.

Selain itu, indikator dengan capaian kinerja kurang dari 90 persen adalah jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS dengan capaian sebesar 98,33 persen. Capaiannya tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Dari target sebanyak 120 pegawai, terealisasi 118 pegawai mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS. Hal ini dikarenakan terdapat 2 orang calon peserta tugas belajar yang tidak lulus pada saat mengikuti tes akademik di Universitas.

Indikator tersebut menghasilkan capaian lebih kecil dibandingkan target Renstra tahun 2018 dan 2019. Hal ini perlu digali informasi lebih dalam lagi apakah perlu melakukan revisi terhadap target indikator tersebut atau mencari solusi untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penggalan lebih dalam lagi perlu dilakukan terutama pada proses perencanaan kegiatan tahun 2019, agar target yang ditentukan tidak terlalu tinggi.

Dalam rangka peningkatan kinerja Pusdiklat BPS, tindak lanjut tidak hanya dilakukan terhadap indikator yang capaiannya kurang dari 90 persen, namun perlu juga dilakukan penajaman terhadap beberapa indikator/IKU sehingga pengukuran keberhasilan sasaran Pusdiklat BPS menjadi lebih relevan. Penajaman IKU bukanlah hal yang mudah mengingat penajaman memerlukan kesiapan, baik dari sisi SDM maupun anggaran yang harus dipenuhi agar IKU yang telah disusun bukan saja dapat diukur tetapi juga dapat dicapai keberhasilannya.

Beberapa indikator sasaran yang perlu dipertajam terkait dengan:

1. Kategori kelulusan Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan: Pengukuran kategori kelulusan peserta diklat perlu dikaji ulang agar memperoleh indikator yang dapat mencerminkan keberhasilan Pusdiklat BPS dalam menyelenggarakan diklat. Penentuan kelulusan peserta berdasarkan penilaian terhadap aspek sikap, perilaku, disiplin, dan akademis. Adanya pola baru pada diklatpim dan prajabatan, untuk nilai akademis selain penilaian ujian di dalam kelas, juga berdasarkan penyusunan kertas kerja aktualisasi bagi peserta diklat prajabatan dan proyek perubahan bagi peserta diklatpim. Hasil penyusunan kertas kerja tersebut diseminarkan baik pada saat rancangan maupun evaluasi akhir. Seminar evaluasi akhir dilakukan setelah dua bulan *off campus* sehingga penentuan kelulusan tidak dapat dilakukan segera setelah diklat selesai. Hal ini berpengaruh terhadap pengukuran capaian kinerja triwulanan karena persentase kelulusan diperoleh setelah selesai seminar. Jika sebelumnya indikator yang dihitung adalah persentase peserta diklat prajabatan dan kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan, maka untuk ke depannya dapat ditambah dengan manfaat yang dirasakan/diperoleh dari hasil Diklat dan Realisasi dari Komitmen Tindak Lanjut bagi peserta Diklatpim dan Rencana Aksi bagi peserta Diklat Prajabatan.
2. Surat Izin Belajar: Perlu perubahan indikator dalam rangka mengukur keberhasilan pengelolaan izin belajar. Bukan hanya dilihat dari persentase Surat izin Belajar yang diselesaikan, melainkan juga dilihat dari sisi *outcome* yang dihasilkan seperti penyelesaian proses izin belajar yang tepat waktu. Dengan demikian capaian indikator akan lebih berkualitas.
3. Tugas Belajar yang dibiayai BPS: Seperti halnya pada indikator penyelesaian surat izin belajar, perlu perubahan pula indikator dalam rangka mengukur keberhasilan penyelenggaraan tugas belajar. Jika sebelumnya hanya dihitung jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS, maka kedepan harus dilihat dari sisi *outcome* yang dihasilkan.

4. Dalam rangka meningkatkan kinerja widyaiswara sebagai ujung tombak pengajar diklat, perlu dimasukkan indikator yang dapat menunjang sasaran strategis meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima.

LAMPIRAN



1. Renstra Pusdiklat BPS 2015-2019

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Satuan Kerja: Pusdiklat BPS						
	SS.1. Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan					
	1.1. Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	90%	91%	92%	93%	94%
	1.2. Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	90%	91%	92%	93%	94%
	1.3. Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	90%	92%	94%	95%	96%
	1.4. Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	1.5. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS	242	265	280	320	324
	SS.2. Terwujudnya Pengelolaan Aset BMN dan Akuntabilitas Kinerja yang Transparan					
	2.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	67	70	72	74	75

2. Reviu Renstra Pusdiklat BPS 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
T. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima	Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	-	-	94 %	95 %	96 %
	SS.1. Meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima					
	IKSS 1.1. Persentase peserta diklat prajabatan dan kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %
	IKSS 1.2. Persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus dengan kategori baik	90 %	91 %	92 %	93%	94 %
	IKSS 1.3. Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus	-	-	80 %	80 %	80 %
	IKSS 1.4. Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	90 %	92 %	94 %	95 %	96 %
	IKSS 1.5. Persentase peserta diklat yang lulus dengan kategori memuaskan	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %
	SS.2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan					
	IKSS 2.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	67	70	72	74	75

3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS 2018

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marsudijono, S.Si, M.M.
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Adi Lumaksono M.A.
Jabatan : Sekretaris Utama
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Adi Lumaksono M.A.
NIP. 19600831 198302 1 002

Jakarta, 8 Juni 2018
Pihak Pertama

Marsudijono, S.Si, M.M.
NIP. 19640814 198702 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima	Persentase Kepuasan Peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	92,5
Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima	Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	Persen	92
	Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	Persen	85
	Persentase Peserta Diklat pengadaan Barang dan Jasa yang lulus	Persen	70
	Persentase Kepuasan Peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	92,5
	Persentase Surat Ijin Belajar yang diselesaikan	Persen	100
	Jumlah Pegawai yang mengikuti Tugas Belajar yang dibiayai BPS	Pegawai	120
Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	70

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	Rp. 63.797.634.000,-
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran Lainnya	Rp. 901.344.000,-
Jumlah	Rp. 63.797.634.000,-

Pihak Kedua

Dr. Adi Lumaksono M.A.
NIP. 19600831 198302 1 002

Jakarta, 8 Juni 2018
Pihak Pertama

Marsudijono, S.Si, M.M.
NIP. 19640814 198702 1 001

4. Pengukuran Capaian Kinerja 2018

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(2)		(4)	(3)	(4)
T: Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima				
Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	92,50	89,51	96,76
SS1: Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima				
Persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	Persen	92,00	97,00	105,43
Persentase peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	Persen	95,00	98,87	104,07
Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus	Persen	70,00	86,14	120,00
Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	92,50	89,51	96,76
Persentase Surat Ijin Belajar yang diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00
Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS	Pegawai	120	118	98,33
SS2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan				
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	70	70,47	100,67
Rata-rata Capaian Indikator Tujuan				96,76
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				103,61

5. Jumlah Pegawai Di Lingkungan Pusdiklat BPS Menurut Jenis Jabatan Satuan Organisasi Tahun 2018

No.	Unit Organisasi	Jenis Jabatan					Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional	Staf	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kepala Pusdiklat	1	-	-	-	-	1
2.	Bagian Tata Usaha	-	1	2	-	28	30
3.	Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan	-	1	2	-	9	12
4.	Bidang Diklat Teknis dan Fungsional	-	1	2	-	5	10
5.	Widyaiswara	-	-	-	22	-	21
Jumlah		1	3	6	22	42	74

6. Jumlah Pejabat Fungsional pada Pusdiklat BPS Keadaan Akhir Tahun 2018

Jabatan Fungsional (1)	Ahli				Total (11)
	Pertama (6)	Muda (7)	Madya (8)	Utama (9)	
Widyaiswara	1	11	9	1	22
Jumlah	1	11	9	1	22

7. Rintisan Pendidikan Gelar Pusdiklat BPS Tahun 2018

Kegiatan Kerjasama Rintisan Gelar Pusdiklat Tahun 2018

No.	Kegiatan	Lembaga/ Instansi	Data/Output yang dihasilkan	Peserta Tugas Belajar		
				Laki- laki	Pere- m- puan	Jumla h
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pendiidikan S2 *)						
1.	Pendidikan Program Studi Magister (S2) Informatika Angkatan IV	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB)	Sumber Daya Manusia (SDM)	7	2	9
2.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Statistika Angkatan IX	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Sumber Daya Manusia (SDM)	2	2	4
3.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Statistika Angkatan V	Universitas Padjadjaran	Sumber Daya Manusia (SDM)	5	5	10
4.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Ketenagakerjaan Angkatan V	Universitas Indonesia	Sumber Daya Manusia (SDM)	2	13	15
5.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Ekonomi	Universitas Indonesia	Sumber Daya Manusia (SDM)	4	9	13
6.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Statistika	Institut Pertanian Bogor	Sumber Daya Manusia (SDM)	2	6	8
7.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Ekonomi	Institut Pertanian Bogor	Sumber Daya Manusia (SDM)	3	3	6
8.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Ekonomi	Universitas Airlangga	Sumber Daya Manusia (SDM)	3	8	11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Ekonomi	Universitas Gadjah Mada	Sumber Daya Manusia (SDM)	7	13	20
10.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Kependudukan	Universitas Gadjah Mada	Sumber Daya Manusia (SDM)	7	7	14
Pendiidikan S3 *)						
11.	Pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi	Universitas Indonesia	Sumber Daya Manusia (SDM)	0	3	3
12.	Pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Statistika	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Sumber Daya Manusia (SDM)	1	2	3
13.	Pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Statistika	Institut Pertanian Bogor	Sumber Daya Manusia (SDM)	0	1	1
Total				43	74	117

Catatan: *) Sistem kerjasama dilakukan dengan swakelola (BPS sebagai pemberi Swakelola/pertanggungjawaban anggaran di BPS)

8. Diklat yang Diselenggarakan oleh Pusdiklat BPS Tahun 2018

Diklat yang Diselenggarakan oleh Pusdiklat Tahun 2018

No.	Nama Diklat	Jumlah Angkatan	Jumlah Peserta			Asal Peserta (BPS/Non BPS)
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Diklat Prajabatan						
1.	Diklat Prajabatan Gol I dan II	-	-	-	-	-
2.	Diklat Prajabatan Gol III	12	197	242	439	BPS
Diklat Kepemimpinan						
1	Diklatpim III	1	30	10	40	BPS
2	Diklatpim IV	6	125	84	209	BPS
Total DPK		19	352	336	688	
Diklat Fungsional						
1	Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli	1	12	11	23	BPS dan NON BPS
2	Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli	1	24	0	24	Non BPS
3	Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil PNBP	2	50	4	54	Non BPS
Diklat Teknis						
1	Diklat Teknis Komputer	1	32	8	40	BPS
2	Diklat Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah	2	38	57	95	BPS
3	Diklat Teknis Pengenalan Statistik Dasar	1	10	4	14	Non BPS
4	Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis	1	15	26	41	BPS
Diklat Sertifikasi						
1	Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi, Kerjasama dengan LKPP	9	169	141	310	BPS
2	Sertifikasi Bendahara	4	51	62	113	BPS
Total DTF		22	401	313	714	
Total			753	649	1.402	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerjasama PNBP (DTF)						
1	Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil	2	50	4	54	Pusdiklat Keuangan Umum, Kementerian Keuangan R.I
2	Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli	1	24	0	24	Pusdiklat Keuangan Umum, Kementerian Keuangan R.I
Total Kerjasama		3	74	4	78	

10. Kalender Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2018

KALENDER DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL TAHUN 2018

NO.	RKA	NAMA DIKLAT	TANGGAL PELAKSANAAN	BANYAKNYA PESERTA
1	Diklat Barjas	Barjas Angkatan XIX	5 - 10 Mar	35 org
2	Diklat Barjas	Barjas Angkatan XX	5 - 10 Mar	35 org
3	Pengembangan SDM	Workshop Index Composite	8 - 9 Mar	30 org
4	Diklat Barjas	Barjas Angkatan XXI	28 Apr - 5 Mei	34 org
5	Diklat Barjas	Barjas Angkatan XXII	2 - 6 Juli	35 org
6	Diklat Fungsional prakom Terampil I (PNBP)	Diklat Fungsional prakom Terampil I (PNBP)	28 Jun - 3 Agst	27 org (di luar Pusdiklat)
7	Diklat Fungsional prakom Terampil II (PNBP)	Diklat Fungsional prakom Terampil II (PNBP)	6 Agst - 14 Sept	27 org (di luar Pusdiklat)
8	Diklat Fungsional prakom Ahli (PNBP)	Diklat Fungsional prakom Ahli (PNBP)	17 Sept - 19 Okt	24 org (di luar Pusdiklat)
9	Sertifikasi Bendahara	Sertifikasi Bendahara I	7 - 10 Okt	26 org
10	Sertifikasi Bendahara	Sertifikasi Bendahara II	7 - 10 Okt	28 org
11	Sertifikasi Bendahara	Sertifikasi Bendahara III	14 - 17 Okt	30 org
12	Sertifikasi Bendahara	Sertifikasi Bendahara IV	14 - 17 Okt	29 org
13	Diklat Fungsional Statistisi Ahli	Diklat Fungsional Statistisi Ahli Angk. XIX	8 Okt - 8 Nov	23 org/22 org
14	Diklat Arsiparis	Diklat Teknis Arsiparis	28 Okt - 3 Nov	41 org
15	Diklat Barjas	Barjas Angkatan XXIII	5 - 9 Nov	35 org
16	Diklat Barjas	Barjas Angkatan XXIV	5 - 9 Nov	35 org
17	Diklat Barjas	Barjas Angkatan XXV	5 - 9 Nov	34 org
18	Diklat Teknis Statistik	Diklat Penulisan KTI Gel. I	5 - 8 Nov	50 org
19	Diklat Teknis Komputer	Diklat Teknis Komputer	21 - 24 Nov	40 org
20	Diklat Teknis Statistik	Diklat Penulisan KTI Gel. II	21 - 24 Nov	56 org
21	Diklat Barjas	Barjas Angkatan XXVI	26 - 30 Nov	31 org
22	Diklat Barjas	Barjas Angkatan XXVII	26 - 30 Nov	36 org
23		Public Speaking	27 - 28 Nov	48 org
24	Diklat Pengenalan Statistik Dasar	Pengenalan Statistik Dasar	3 - 7 Des	14 org